TAHUN
2021

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
DAN SUMBER DAYA ALAM
SEKRETARIAT DAERAH DIY

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta
Telp. : (0274) 562811 psw 1302
Website : http://biroperekonomian.jogjaprov.go.id

Kata Pengantar

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah DIY Tahun 2021 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021. LKjIP Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah DIY Tahun 2021 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Penyusunan LKjIP Tahun 2021 diwarnai agenda *refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan darurat serta dampak *pandemic* COVID-19. Sumber Daya yang dimiliki Pemerintah Daerah difokuskan untuk menjamin ketersediaan dukungan bidang Kesehatan, bantuan sosial dan upaya pemulihan ekonomi dari dampak *pandemic* COVID-19. Meskipun demikian, sebagai jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah DIY, Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah DIY tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam RPJMD DIY Tahun 2017-2022.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Yogyakarta, Februari 2022
Kepala Biro Administrasi Perekonomian
dan Sumber Daya Alam Setda DIY,

YUNA PANCAWATI, S.E., M.Si.
NIP. 196606041993032007

Ikhtisar Eksekutif

Capaian kinerja Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah DIY tahun 2021 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Capaian sasaran strategis 1 “Meningkatnya Kualitas Rumusan Bahan Kebijakan dan Evaluasi Kebijakan Bidang Perekonomian dan SDA”:

   - Diukur dengan indikator persentase rumusan kebijakan menjadi kebijakan dan hasil evaluasi menjadi rekomendasi yang ditindaklanjuti dalam perencanaan tahun n+1 (persentase rumusan kebijakan menjadi kebijakan dan hasil evaluasi menjadi rekomendasi yang ditindaklanjuti dalam perencanaan tahun n+1).
   - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 1 (satu) Program, yakni Program Perekonomian dan Pembangunan.
   - Target capaian indikator sasaran tahun 2021 sebesar 95%; sampai dengan bulan Desember 2021 terealisasi 100%. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 105%.
   - Dibandingkan dengan capaian target tahun 2020 sebesar 105% memang terjadi penurunan sebesar 5%, namun secara target tahunan pada tahun ini telah melampaui target sebesar 5%.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah DIY ke depan, sebagai berikut:

1) Ketimpangan pembangunan antar wilayah
2) Daya saing daerah relatif masih rendah
3) Daya dukung lingkungan semakin menurun
4) Kontribusi sektor dominan belum maksimal

Sehingga perlu adanya kebijakan yang implementatif dan berdampak langsung kepada masyarakat sehingga keempat masalah besar di bidang perekonomian tersebut dapat terselesaikan pada akhir RPJMD 2017-2022.

Dalam rangka mengatasi permasalahan yang ada, maka disusun suatu arah kebijakan yang terfokus pada Pengembangan Pusat Pertumbuhan, Pengembangan sektor Dominan di DIY, dan Tata Kelola Lingkungan Hidup. Sebagai kerangka implementasi arah kebijakan yang telah ditentukan tersebut, maka Pemda DIY akan mendukung kegiatan-kegiatan yang memajukan wilayah pinggiran dan terpencil serta melaksanakan program besar yang memberikan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Daftar Isi

KATA PENGANTAR.....2
IKHTISAR EKSEKUTIF.....3
DAFTAR ISI.....5
DAFTAR TABEL.....6
DAFTAR GAMBAR.....7
BAB I PENDAHULUAN.....8
1.1 Cascading Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah 8
1.2 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY..... 10
1.3 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan.....11
1.4 Isu-isu Strategis 12
1.5 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran..... 13
1.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2020 15
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....17
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD.....17
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan..... 18
2.3 Struktur Program dan kegiatan 2021..... 19
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2021.....21
2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja..... 22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA..... 25
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2021.....25
3.2. Analisis Ketercapaian Kinerja Tahun 2021..... 26
3.3. Efisiensi Anggaran.....47
3.4. Inovasi.....48
3.5. Lintas Sektor..... 49
BAB IV PENUTUP..... 68
LAMPIRAN-LAMPIRAN..... 70

Daftar Tabel

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikas Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi..... 13
Tabel I.2 Sarana-Prasarana..... 14
Tabel I.3 Perbandingan Anggaran Tahun 2020 dan 2021..... 14
Tabel II.1 Sasaran Strategis Biro Administrasi perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah DIY, 2017-2022..... 18
Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan..... 18
Tabel II.3.1 Struktur Program dan Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2021..... 19
Tabel II.3.2 Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2021 20
Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY Tahun 2021..... 22
Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja..... 25
Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2021..... 25
Tabel III.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan..... 26
Tabel III.4 Pengukuran Capaian Sasaran 1..... 25
Tabel III.4 Perbandingan Target dan Capaian..... 27
Tabel III.5 Target dan Realisasi Kinerja..... 33
Tabel III.6 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2021..... 48
Tabel III.7 Inventarisasi Lintas Sektor..... 51

Daftar Gambar

Gambar I.1. Cascading Kinerja..... 9
Gambar I.2. Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY 10
Gambar I.3. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Organisasi Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY..... 11
Gambar II.1. Sistem Integrasi ROPK,Monitoring dan Evaluasi, E-SAKIP..... 23
Gambar III.1. Penghargaan TPID Provinsi Berkinerja Terbaik Wilayah Jawa-Bali..... 33
Gambar III.2. Penghargaan Wilayah Terbaik dalam Implementasi SimPel/SimPel iB Tingkat Provinsi..... 35
Gambar III.3. Evaluasi Evaluasi Penyelenggaraan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya Tahun 2021..... 37
Gambar III.4. Capaian Kinerja Pemerintah Daerah dalam Pemanfaatan DBH CHT..... 46
Gambar III.5. Bidang Penegakan Hukum DBH CHT..... 47

BAB I

Pendahuluan

Bab I berisi :

1. *Cascading Kinerja*
2. *Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi*
3. *Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan*
4. *Isu-Isu Strategis*
5. *Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran*
6. *Tindak Lanjut atas Rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2020*

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

1.1 *Cascading* Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja *(Performance Based Organization)* yang diterapkan Pemerintah Daerah DIY, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah DIY tahun 2017 – 2022. Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah DIY dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

Gambar I.1 Cascading Kinerja

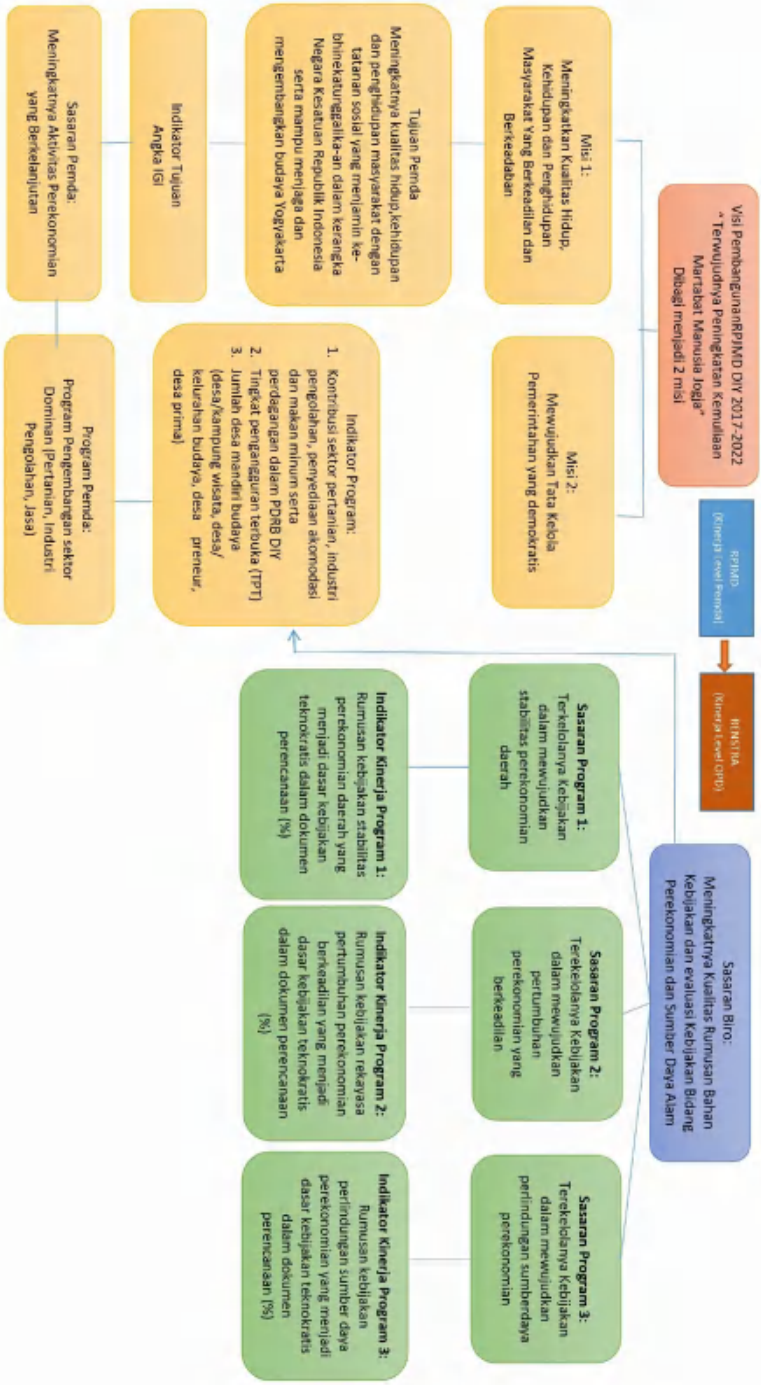

Sumber: Renstra Biro Administrasi Perekonomian dan SDA 2017-2022

1.2 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi

Hubungan antara mandat kinerja, peta proses bisnis dan desain struktur organisasi Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY sebagaimana tersaji dalam gambar berikut:

Gambar I.2 Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY

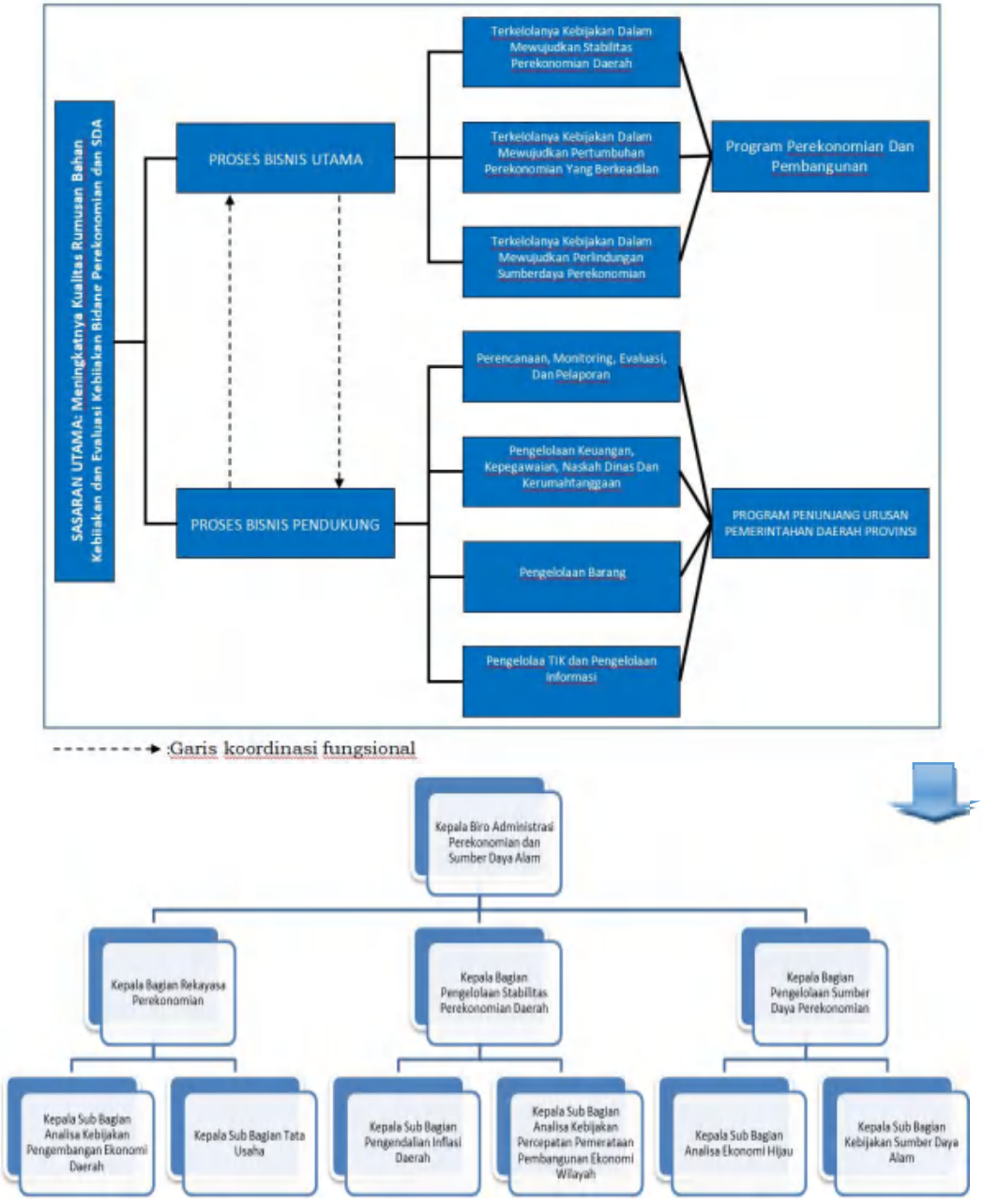

1.3 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan

Dalam upaya mewujudkan kinerja sebagaimana telah dimandatkan dalam RPJMD, Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY memiliki tugas dan fungsi yang kemudian menjadi dasar penempatan personil dalam jabatan sebagaimana gambar berikut:

Gambar I.3. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Organisasi Biro Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY

Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Gubernur DIY Nomor 53 Tahun 2018 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja sekretariat daerah, Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY mempunyai tugas melaksanakan fungsi pendukung perumusan kebijakan strategis bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam. Adapun fungsi Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam sebagai berikut:

1. Penyusunan program kerja Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
2. Penyusunan bahan perumusan kebijakan pengelolaan stabilitas perekonomian, rekayasa perekonomian, dan pengelolaaan sumber daya perekonomian;
3. Koordinasi perumusan kebijakan pengelolaan stabilitas perekonomian, rekayasa perekonomian, dan pengelolaaan sumber daya perekonomian;
4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan stabilitas perekonomian, rekayasa perekonomian, dan pengelolaaan sumber daya perekonomian;
5. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Biro;
6. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Biro.

Sesuai Pelaksanaan tugas fungsi Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam dibagi habis ke dalam jabatan struktural dan jabatan pelaksana berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 15 tahun 2021 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pergub 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Kualifikasi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan komposisi sebagai berikut:

Jabatan Struktural	Jabatan Pelaksana
1. Kepala Biro 2. Kabag Pengelolaan Stabilitas Perekonomian Daerah: 1) Kasubbag Pengendalian Inflasi Daerah 2) Kasubbag Analisis Kebijakan Percepatan Pemerataan Pembangunan Ekonomi Wilayah 3. Kabag Pengelolaan Sumber Daya Perekonomian: 1) Kasubbag Analisis Kebijakan Ekonomi Hijau 2) Kasubbag Analisis Kebijakan Perlindungan Sumber Daya Alam 4. Kabag Rekayasa Perekonomian: 1) Kasubbag Analisis Kebijakan Pengembangan Ekonomi Daerah 2) Kasubbag Tata Usaha	1. Dibawah Kasubbag Pengendalian Infasi Daerah: 1) Analis Perekonomian 2) Pengadministrasi Umum 2. Dibawah Kasubbag Analisis Kebijakan Percepatan Pemerataan Pembangunan Ekonomi Wilayah: 1) Analis Pembangunan 3. Dibawah Kasubbag Analisis Kebijakan Ekonomi Hijau 1) Analis Program/ Kegiatan Pembangunan Pertanian 2) Pengadministrasi Umum 4. Dibawah Kasubbag Analisis Kebijakan Perlindungan Sumber Daya Alam 1) Analisis Kelautan dan Perikanan 5. Dibawah Kasubbag Analisis Kebijakan Pengembangan Ekonomi Daerah 1) Analis Pengembangan Potensi Daerah 2) Pengadministrasi Umum 6. Dibawah Kasubbag Tata Usaha: 1) Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan; 2)Pengelola Akuntansi; 3) Pengadministrasi Kepegawaian; 4)Pengelola Gaji; 5)Pengadministrasi Keuangan; 6)Pengelola Barang Milik Negara; 7)Pranata Kearsipan; 8)Verifikator Data Laporan Keuangan; 9)Pengadministrasi Persuratan; 10)Bendahara; 11) Pengemudi

1.4 Isu-Isu Strategis

Isu strategis pembangunan bidang perekonomian menjadi bagian penting di dalam perencanaan pembangunan. Isu strategis dalam hal ini dibangun pada beberapa sektor pembangunan, meliputi sektor industri dan perdagangan, akses keuangan daerah, koperasi dan UMKM, tenaga kerja dan transmigrasi, pariwisata, pertanian dan ketahanan pangan, serta kelautan dan perikanan.

Pembangunan ekonomi daerah perlu memberikan solusi jangka pendek dan jangka panjang terhadap isu-isu ekonomi daerah yang dihadapi. Oleh karena itu, Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam melakukan analisis terhadap isu-isu strategis agar dapat menghasilkan bahan rumusan kebijakan strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui percepatan berusaha, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, pemerataan pembangunan wilayah menuju masyarakat mandiri, adil, maju dan sejahtera.

Program prioritas yang menjadi pendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama Biro Administrasi Perekonomian dan SDA adalah Program Pengelolaan Kebijakan Stabilitas Perekonomian Daerah, Program Pengelolaan Kebijakan Rekayasa Pertumbuhan Perekonomian berkeadilan, dan Program Pengelolaan Kebijakan Perlindungan Sumber Daya Perekonomian. Program prioritas tersebut merupakan rangkaian kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh Biro Administrasi Perekonomian Dan Sumber Daya Alam Setda DIY ataupun bersama instansi terkait lainnya maupun dengan masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, yaitu menghasilkan bahan rumusan kebijakan bidang perekonomian dan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas.

1.5 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2020 sebagaimana tabel berikut:

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

No	Jabatan	Formasi					Pegawai yang ada					Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifikasi				Jml	Kualifikasi				L	P
			S2	S1	D3	SMA		S2	S1	D3	SMA		
1	2	3	4				5	6				7	9
A.	Jabatan Pimpinan Tinggi	1	1				1	1					1
B.	Jabatan Administrasi												
	1. Administrator	3	3				3	1	2			1	2
	2. Pengawas	6		6			6	5	1			5	1
	3. Pelaksana	32		7	11	1	24	8	7	2	7	12	12
C.	Jabatan Fungsional												
	Jumlah	42					34	15	10	2	7	18	16

Sumber: Data Kepegawaian Biro Desember 2021

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah DIY relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S2 sebanyak 15 orang (44,12%) , disusul oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 10 orang (29,41%), SLTA sebanyak 7 orang (20,59%), D3 sebanyak 2 orang (5,88%). Komposisi pegawai laki-laki sedikit lebih banyak dibanding pegawai perempuan, sedangkan untuk jabatan struktural merata antara laki-laki dan perempuan. Hal ini menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

Masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 8 orang pelaksana. Jika dilihat dari aspek kualifikasi pendidikan, Biro Administrasi Perekonomian dan SDA mempunyai SDM dengan kualifikasi pendidikan yang lebih tinggi daripada yang dipersyaratkan dalam Peraturan Gubernur DIY nomor 104 tahun 2018 tentang kualifikasi Jabatan Pelaksana dan Perkiraan Kebutuhan Pegawai. Dari aspek kualifikasi pendidikan terdapat 7 pegawai yang mempunyai kualifikasi pendidikan lebih tinggi dari yang dipersyaratkan. Namun masih terdapat 8 pegawai yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan akan tetapi karena faktor pengalaman kerja mereka memiliki kompetensi dalam jabatan yang diduduki.

Tabel I.2 Sarana-Prasarana

No	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset (Rp)*
	Aset Tetap		
1	Alat-alat Angkutan	8 unit	848.525.314
2	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	281 unit	900.216.399
3	Alat-alat Studio dan Komunikasi	9 unit	56.310.000
	Aset Tetap Lainnya		
1	Buku Perpustakaan	409 buku	23.439.000
	Jumlah		1.828.490.713

Sumber: Buku inventaris tahun 2021
**Nilai aset belum memperhitungkan penyusutan di tahun 2021*

Kendaraan dinas terdiri dari yakni 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan, 3 (tiga) unit kendaraan operasional, dan 2 (dua) unit kendaraan roda dua. Kebutuhan ruangan kantor umum relatif sudah tersedia meliputi ruang rapat, ruang pengelola keuangan, ruang arsip, ruang gudang, ruang tunggu, dan toilet. Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi baik. Rasio personal computer/laptop dibanding jumlah pegawai mendekati 1 : 1. Dengan demikian ketersediaan sarana dan prasarana sudah memadai.

Tabel I.3 Anggaran Tahun 2021

Kode Rekening			**Uraian**	**Sebelum Perubahan (Rp)**	**Setelah Perubahan (Rp)**	**Bertambah/ Berkurang (Rp)**
5			**BELANJA DAERAH**			
5	**1**		**BELANJA OPERASI**	**Rp. 8.821.596.746**	**Rp. 8.185.139.388**	**Rp. (636.457.358)**
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp. 4.998.630.746	Rp. 4.709.303.388	Rp (289.327.358).
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp 3.907.572.000	Rp 3.560.442.000.	Rp. (347.130.000)
5	**2**		**BELANJA MODAL**	**Rp. 84.606.000**	**Rp. 84.606.000**	**Rp. 0**
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 46.766.000	Rp. 46.766.000	Rp. 0

Kode Rekening			Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp. 36.540.000	Rp. 36.540.000	Rp. 0
5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp. 1.300.000	Rp. 1.300.000	Rp. 0
			Jumlah Belanja	**Rp. 8.906.202.746**	**Rp. 8.269.745.388**	**Rp. (636.457.358)**

Sumber data: Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Tahun 2021

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam berasal dari APBD Daerah Istimewa Yogyakarta dan Dana Keistimewaan. Terlihat pada tabel I.3, untuk tahun 2021 Anggaran Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam semula Rp. **8.906.202.746** dan mengalami perubahan menjadi Rp. **8.269.745.388** atau berkurang Rp. **636.457.358** Perubahan anggaran Tahun 2021 merupakan cerminan dukungan Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY dalam bentuk *Refocusing* dan realokasi anggaran. *Refocusing* dan realokasi anggaran dilakukan sebagai bentuk konsolidasi fiskal menjamin ketersediaan dukungan bidang kesehatan, bantuan sosial dan upaya pemulihan ekonomi dari dampak *pandemic* COVID-19.

1.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2020

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
1.	Surat Inspektur DIY Nomor : 700/01377 tanggal 13 Maret 2021, perihal Laporan Hasil Evaluasi Implementasi Sistem AKIP Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah DIY. Rekomendasi: a. Melakukan evaluasi atas program dan kegiatan OPD terkait output dan outcome yang belum sesuai dengan target yang ditetapkan b. Terus melakukan upaya untuk meningkatkan kinerja organisasi sehingga seluruh target baik output	Sudah dilakukan monitoring dan evaluasi setiap bulan di tingkat internal Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY atas program dan kegiatan agar kegiatan dapat berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan, termasuk dalam hal evaluasi kinerja secara menyeluruh, diharapkan ke depan hasil atas implementasi SAKIP di biro dapat lebih meningkat.

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
	maupun outcome yang ditetapkan dapat tercapai dan bisa mendapatkan penilaian yang baik atas kinerja dari stakeholder	

BAB 2

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Bab 2 Berisi :

1. *Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD*
2. *Strategi dan Arah Kebijakan*
3. *Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2021*
4. *Perjanjian Kinerja Tahun 2021*
5. *Instrumen Pendukung Capaian Kinerja OPD*

Perencanaan dan penganggaran pada tahun 2021 diwarnai agenda *refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan darurat serta dampak *pandemic* COVID-19. Hal ini membawa dampak pada perumusan Perjanjian Kinerja perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah DIY melalui reviu/perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2021. *Refocusing* dan realokasi anggaran dilakukan sebagai bentuk konsolidasi fiskal menjamin ketersediaan dukungan bidang kesehatan, bantuan sosial dan upaya pemulihan ekonomi dari dampak *pandemic* COVID-19. Meskipun demikian, sebagai jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah DIY, Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam RPJMD DIY Tahun 2017-2022.

Renstra Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah DIY yang merupakan penjabaran operasional RPJMD 2017 - 2022 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2017 – 2022. Renstra ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017–2022 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017–2022.

2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

Sesuai *cascade* kinerja, Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah meningkatnya aktivitas perekonomian berkelanjutan yang didukung oleh Program Pengembangan sektor Dominan (Pertanian, Industri Pengolahan, Jasa). Terkait hal

tersebut tujuan jangka menengah Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah DIY selama lima tahun adalah :

"Menghasilkan bahan rumusan kebijakan strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui percepatan berusaha, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, pemerataan pembangunan wilayah menuju masyarakat mandiri, adil, maju dan sejahtera"

Adapun sasaran Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY dalam waktu lima tahun sebagai berikut:

Tabel II.1 Sasaran Strategis Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah DIY, 2017-2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Baseline 2017	TARGET TAHUNAN					Target Akhir Renstra
					2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatnya Kualitas Rumusan Bahan Kebijakan dan evaluasi Kebijakan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	persentase rumusan kebijakan menjadi kebijakan dan hasil evaluasi menjadi rekomendasi yang ditindaklanjuti dalam perencanaan tahun n+1	%	54,71	80	85	90	95	100	100

2.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan

NO.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Meningkatnya Kualitas Rumusan Bahan Kebijakan dan evaluasi Kebijakan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Peningkatan kualitas rumusan bahan kebijakan dan evaluasi kebijakan bidang perekonomian dan SDA melalui ekonomi inklusif yang berkelanjutan	Merumuskan arah kebijakan perekonomian dan pengelolaan sumber daya alam hayati berwawasan lingkungan untuk kesejahteraan masyarakat

2.3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2021

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY tahun 2021 maupun program dan kegiatan pendukung sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.3.1. Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2021

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
Meningkatnya Kualitas Rumusan Bahan Kebijakan dan valuasi Kebijakan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	1.1. Program Perekonomian dan Pembangunan	**3.216.775.000**	**3.131.425.000**	**(85.350.000)**
	1.1.1. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	1.790.338.000	1.691.238.000	(99.100.000)
	1.1.1.1. Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	1.546.947.500	1.454.247.500	(92.700.000)
	1.1.1.2. Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	243.390.500	236.990.500	(6.400.000)
	1.1.2. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	1.018.000.000	1.070.430.000	52.430.000
	1.1.2.1 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	1.018.000.000	1.070.430.000	52.430.000
	1.1.3. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	408.437.000	369.757.000	(38.680.000)
	1.1.3.1 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka	408.437.000	369.757.000	(38.680.000)

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	Usaha			
Total Anggaran yang Berkaitan Langsung dengan Pencapaian Sasaran		**3.216.775.000**	**3.131.425.000**	**(85.350.000)**

Tabel II.3.2. Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2021

No.	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	**5.689.427.746**	**5.138.320.388**	**(551.107.358)**
	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**15.977.000**	**15.977.000**	0
	1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.213.000	10.213.000	0
	1.2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.764.000	5.764.000	0
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**4.998.630.746**	**4.709.303.388**	**(289.327.358)**
	2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.958.046.746	4.668.719.388	(289.327.358)
	2.2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	36.600.000	36.600.000	0
	2.4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3.984.000	3.984.000	0
	3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	**444.310.000**	**182.570.000**	**(261.740.000)**
	3.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000	2.444.000	(56.000)
	3.2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.930.000	6.930.000	0
	3.3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	22.160.000	22.160.000	0
	3.4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.520.000	8.740.000	(780.000)
	3.5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	328.200.000	67.296.000	(260.904.000)
	3.6. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	75.000.000	75.000.000	0

No.	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5
	pada SKPD			
	4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**84.500.000**	**84.500.000**	**0**
	4.1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	47.000.000	47.000.000	0
	4.2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	37.500.000	37.500.000	0
	5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	**34.545.000**	**34.545.000**	**0**
	5.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	34.545.000	34.545.000	0
	6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**111.465.000**	**111.425.000**	**(40.000)**
	6.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25.730.000	25.730.000	0
	6.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	67.985.000	67.945.000	(40.000)
	6.3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.750.000	17.750.000	0
	Total Anggaran Pendukung	**5.689.427.746**	**5.138.320.388**	**(551.107.358)**

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Tahun 2021

2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerjanya. Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bapak Gubernur DIY sebagai berikut:

Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Rumusan Bahan Kebijakan dan valuasi Kebijakan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	persentase rumusan kebijakan menjadi kebijakan dan hasil evaluasi menjadi rekomendasi yang ditindaklanjuti dalam perencanaan tahun n+1	%	95	Triwulan I	12,5
					Triwulan II	37,5
					Triwulan III	85
					Triwulan IV	95

Pada tahun 2021, Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY melaksanakan reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Reviu dilakukan karena adanya *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran untuk penangangan pandemi COVID-19 serta telah ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2021. Perjanjian Kinerja (Reviu) Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Rumusan Bahan Kebijakan dan valuasi Kebijakan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	persentase rumusan kebijakan menjadi kebijakan dan hasil evaluasi menjadi rekomendasi yang ditindaklanjuti dalam perencanaan tahun n+1	%	95	Triwulan I	12,5
					Triwulan II	37,5
					Triwulan III	85
					Triwulan IV	95

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Program RPJMD	Penyandingan Program Permendagri 90 Tahun 2019 dan Pemutakhirannya	Anggaran
1.	Program Pengelolaan Kebijakan Rekayasa Pertumbuhan Perekonomian Berkeadilan	Program Perekonomian dan Pembangunan (APBD)	Rp. 3.046.060.000
2.	Program Pengelolaan Kebijakan Perlindungan Sumberdaya Perekonomian		
3.	Program Pengelolaan Kebijakan Stabilitas Perekonomian Daerah		
4.	Program Pengelolaan Kebijakan Perlindungan Sumberdaya Perekonomian	Program Perekonomian dan Pembangunan (DBH CHT)	Rp. 85.365.000
5.	Program Administrasi Perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (APBD)	Rp. 5.138.320.388
6.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
1.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan		
	Jumlah Anggaran		Rp. 8.269.745.388

2. Mengelola Dana Keistimewaan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan, Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Subkegiatan Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya Rp. 53.710.000

2.5. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Daerah DIY adalah aplikasi sengguh.jogjaprov.go.id yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD.

Gambar II.1. Sistem Integrasi ROPK, Monitoring dan Evaluasi, E-SAKIP

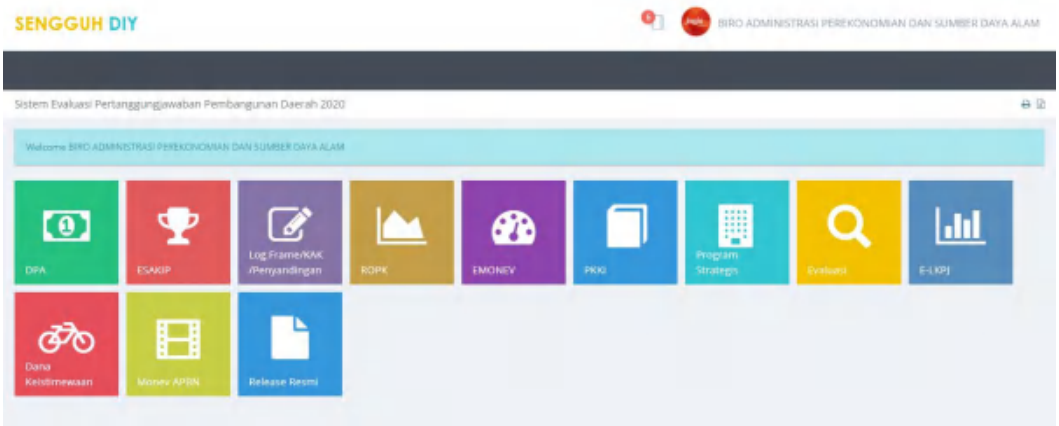

Sumber:http://sengguh.jogjaprov.go.id/

BAB 3

Akuntabilitas Kinerja

Bab 3 Berisi :

1. *Capaian Kinerja Tahun 2021*
2. *Realisasi Anggaran*
3. *Inovasi*
4. *Lintas Sektor*

3.1. Capaian Kinerja Tahun 2021

Biro Administrasi perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah DIY telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kepala Biro dministrasi perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah DIY dengan Bapak Gubernur DIY tahun 2021. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	91 ≤ 100	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	76 ≤ 90	Tinggi	Hijau Muda
3.	66 ≤ 75	Sedang	Kuning Tua
4.	51 ≤ 65	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

❖ *Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017*

Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/META INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2017	CAPAIAN 2020	TAHUN 2021				TARGET AKHIR RPJMD
						TAR GET	REALI SASI	PERSEN TASE	KRITERIA / KODE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Kualitas Rumusan Bahan Kebijakan dan Evaluasi Kebijakan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya	Indikator: persentase rumusan kebijakan menjadi kebijakan dan hasil evaluasi menjadi rekomendasi yang ditindaklanjuti dalam	%	54,71	105	95	100	105	Sangat Baik	100

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/META INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2017	CAPAIAN 2020	TAHUN 2021				TARGET AKHIR RPJMD
						TAR GET	REALI SASI	PERSEN TASE	KRITERIA / KODE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Alam	perencanaan tahun n+1 Meta Indikator: persentase rumusan kebijakan menjadi kebijakan dan hasil evaluasi menjadi rekomendasi yang ditindaklanjuti dalam perencanaan tahun n+1								

3.1. Analisis Ketercapaian Kinerja Tahun 2021

Adapun analisis capaian kinerja per sasaran stategis diuraikan sebagai berikut:

3.1.1. Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Rumusan Bahan Kebijakan dan Evaluasi Kebijakan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Kinerja sasaran meningkatnya kualitas rumusan bahan kebijakan dan evaluasi kebijakan bidang perekonomian dan sumber daya alam diukur dengan persentase rumusan kebijakan menjadi kebijakan dan hasil evaluasi menjadi rekomendasi yang ditindaklanjuti dalam perencanaan tahun n+1.

Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Rumusan Bahan Kebijakan dan Evaluasi Kebijakan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	persentase rumusan kebijakan menjadi kebijakan dan hasil evaluasi menjadi rekomendasi yang ditindaklanjuti dalam perencanaan tahun n+1	persentase rumusan kebijakan menjadi kebijakan dan hasil evaluasi menjadi rekomendasi yang ditindaklanjuti dalam perencanaan tahun n+1

Sumber data perhitungan rumusan kebijakan menjadi kebijakan dan hasil evaluasi menjadi rekomendasi yang ditindaklanjuti dalam perencanaan tahun n+1 pada tahun 2021 ditetapkan 5 (lima) dokumen yaitu :

1. Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Inflasi Daerah,

2. Rekomendasi Kebijakan Percepatan Pemerataan Pembangunan Ekonomi Wilayah,
3. Rekomendasi kebijakan pengembangan ekonomi daerah,
4. Rekomendasi Kebijakan Perlindungan Sumber Daya Alam Berkelanjutan dan
5. Rekomendasi *green economic*

Tabel III.4 Perbandingan Target dan Capaian

No	Target sesuai Rumpun dokumen	Capaian 2021	
		Rumpun	Kebijakan/Rekomendasi
1	Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Inflasi Daerah,	Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Inflasi Daerah,	a. Surat Edaran tentang Penyerapan Dan Pemanfaatan Komoditas Pangan Lokal Nomor: 510/3074 Tanggal: 17 Februari 2021. Penyerapan dan Pemanfaatan Komoditas Pangan Lokal dilakukan untuk menjaga stabilitas inflasi. Penyerapan dan Pemanfaatan Komoditas Pangan lokal dengan harga wajar terutama saat terjadi kelebihan hasil produksi yang menyebabkan harga anjlok. Hal ini juga sebagai tindak lanjut dari Pergub DIY nomor 71 tahun 2020 tentang pengelolaan tata niaga pangan lokal. b. Surat Edaran tentang Implementasi Program Beras ASN. Hal ini sebagai implementasi Penyerapan dan Pemanfaatan Komoditas Pangan Lokal dalam rangka mendukung stabilitas inflasi. c. Rencana Kerja antara Pemerintah Daerah DIY dan Bank Indonesia tentang Pendataan, Pengembangan Sistem Ekonomi Hub (Pusat) dan Pengembangan Sektor Riil Perekonomian DIY
2	Rekomendasi Kebijakan Percepatan Pemerataan	Rekomendasi Kebijakan Percepatan Pemerataan Pembangunan Ekonomi	a. Nota Dinas Percepatan Akses Keuangan Daerah. Program unggulan dalam percepatan akses keuangan daerah berupa business matching

No	Target sesuai Rumpun dokumen	Capaian 2021	
		Rumpun	Kebijakan/Rekomendasi
	Pembangunan Ekonomi Wilayah,	Wilayah,	melalui optimalisasi penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) pada destinasi prioritas pariwisata DIY. b. Program tematik berupa optimalisasi produk dan layanan keuangan, penguatan infrastruktur dan akses keuangan dan peningkatan literasi keuangan. c. Surat Penunjukan Sekolah Pilot Project Program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) DIY 2021 sebagai tindak lanjut dalam program simpanan pelajar (simpel)
4	Rekomendasi kebijakan pengembangan ekonomi daerah,	Rekomendasi kebijakan pengembangan ekonomi daerah,	a. Nota Dinas Hasil Koordinasi tentang perpanjangan relaksasi dari lembaga keuangan kepada industri pariwisata b. Nota Dinas Koordinasi Tindak Lanjut Arahan Bapak Gubernur DIY tentang Pelaksanaan Desa Mandiri Budaya c. Surat Gubernur DIY Nomor 556/6650 tanggal 5 April 2021 Kepada Bupati/Walikota se-DIY perihal Pemberian Stimulus/Insentif berupa Penghapusan /Keringanan atas Pajak dan Retribusi Daerah bagi Pelaku Usaha Industri Pariwisata DIY d. Surat Edaran Gubernur tentang Gerakan Berwisata Aman dan Sehat dalam Upaya Mendorong Percepatan Pemulihan Industri Pariwisata DIY e. Kesepakatan Bersama Antara Gubernur Anggota Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU) tentang Pengembangan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif f. Nota Dinas Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Percepatan Pelaksanaan Berusaha di Daerah Istimewa Yogyakarta

No	Target sesuai Rumpun dokumen	Capaian 2021	
		Rumpun	Kebijakan/Rekomendasi
			g. Nota dinas tentang Hasil Koordinasi Pembahasan Usulan Program Prioritas Pembangunan Kawasan Pantai Selatan Gunungkidul h. Nota Dinas tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Terhadap Progress Pelaksanaan Program Prioritas Pembangunan DIY pada Kawasan Sumbu Filosofi dan Kawasan Pantai Selatan DIY i. Keputusan Gubernur DIY Nomor 383/KEP/2021 tentang Penetapan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya Tahun 2021 j. Nota Dinas Terkait Pelaksanaan Masterplan Jogja Smart Province (JSP) Untuk Mendukung Program Prioritas Pembangunan DIY k. Nota Dinas perihal Rekomendasi Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Kebijakan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya Tahun 2021 l. Nota Dinas tentang Arah Kebijakan Perekonomian Tahun 2023
5	Rekomendasi Kebijakan Perlindungan Sumber Daya Alam Berkelanjutan dan	Rekomendasi Kebijakan Perlindungan Sumber Daya Alam Berkelanjutan dan	a. nota dinas evaluasi roadmap pengembangan usaha garam di DIY
6	Rekomendasi green economic	Rekomendasi green economic	a. Nota Dinas tentang Potensi Ekspor Produk Pertanian DIY b. Nota Dinas tentang Percepatan Ekspor Produk Pertanian di DIY c. Nota Dinas tentang Kajian Penyusunan Valuasi Jasa Lingkungan Sektor Utama Pendukung Percepatan Pemulihan Ekonomi

No	Target sesuai Rumpun dokumen	Capaian 2021	
		Rumpun	Kebijakan/Rekomendasi
			d. Nota Dinas tentang Kajian Pengelolaan Pertanian Tanaman Pangan Berbasis Pada Sosial Budaya dan Kearifan Lokal Pada Masyarakat Kawasan Pesisir Pantai Bantul, Kulon Progo, Gunungkidul
7		Dokumen Nota Kesepakatan dan Perjanjian Kerjasama terkait pengembangan ekonomi daerah:	a. Nota Dinas nomor 580/01617 tentang Laporan Hasil Kegiatan Knowledge Sharing Sinergi Memperkuat Perlindungan Konsumen di Industri Keuangan b. Nota Dinas Nomor: 443/02631 Tanggal 14 September 2021 tentang Sosialisasi Penerapan Aplikasi PeduliLindungi dan Uji Coba Operasional pada Perkantoran Sektor Non Esensial c. Draft Perjanjian Kerjasama Kesepakatan Bersama Antara Kepala Dinas Pariwisata Anggota Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU) tentang Penyelenggaraan Program Travel Corridor d. Nota Dinas Pembaharuan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Kawasan Hutan Lindung Mangunan e. Nota Dinas Nomor 503/01008 tanggal 29 April 2021 tentang Hasil Sosialisasi Kegiatan Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) Pemerintah Daerah serta Kinerja PBB Kementerian Negara / Lembaga f. Nota Dinas Nomor 560/01149 tanggal 11 Mei 2021 tentang Hasil Penerimaan Kunjungan Tim Percepatan Penyelenggaraan ULD Bidang Ketenagakerjaan g. Nota Dinas Nomor 556/02329

No	Target sesuai Rumpun dokumen	Capaian 2021	
		Rumpun	Kebijakan/Rekomendasi
			tanggal 20 Agustus 2021 tentang Hasil Pembahasan Terkait Tindak Lanjut Surat GIPI DIY Terkait Penyampaian Sikap dan Rekomendasi Industri dan Profesi Anggota DPD GIPI DIY terhadap Perpanjangan PPKM Darurat h. Nota Dinas Nomor 119/02648 tanggal 15 September 2021 tentang Hasil Audiensi Terkait Potensi Kerjasama Antara PT Ayopop Teknologi Indonesia dengan Pemda DIY i. Nota Dinas nomor 556/02716 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi terhadap Pelaksaan SE Gubernur DIY nomor 443/7130 tentang Pemberian Insentif/Stimulus Berupa Pengurangan atau Penghapusan Pajak dan Retribusi Daerah bagi Pelaku Usaha. j. Nota Dinas nomor 579/ 03681 tanggal 08 November 2021 tentang Ekspose Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Daerah, tema “Membangun Iklim Penanaman Modal Yang Berdaya Saing Dalam Rangka Mendorong Pertumbuhan Ekonomi di DIY” k. Nota Dinas Hasil Koordinasi Pembahasan Rencana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Wisata Becici Sebagai Desa Wisata Binaan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Area Yogyakarta (14 Desember 2021/ nomor 556/04950) l. Nota Dinas nomor 556/05413 tanggal 23 Desember 2021 perihal Laporan

No	Target sesuai Rumpun dokumen	Capaian 2021	
		Rumpun	Kebijakan/Rekomendasi
			Hasil Penguatan Forum Asda Ekbang Provinsi Se-Indonesia dengan Kementerian /Lembaga, KADIN dan BUMD pada Acara West Java Trade, Tourism, and Investment Partnership (WJ-TRIP) 2021

Capaian kinerja fasilitasi perekonomian dan Sumber Daya Alam tahun 2021 dengan indikator Persentase rumusan kebijakan menjadi kebijakan dan hasil evaluasi menjadi rekomendasi yang ditindaklanjuti dalam perencanaan tahun n+1 terealisasi sebesar 100% dari target 95% atau dengan persentase capaian sebesar 105%.

Kinerja sasaran terwujudnya kapasitas kelembagaan perangkat daerah yang sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah pada tahun 2021 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel III.5 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

No	Indikator Sasaran	Capaian 2020	2021			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2021 terhadap target 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi*		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kualitas Rumusan Bahan Kebijakan dan Evaluasi Kebijakan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	105	95	100 (5/5*100)	105 (100/95*100)	100	100

Analisis Ketercapaian Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Rumusan Bahan Kebijakan dan Evaluasi Kebijakan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam adalah sebagai berikut:

a. Tercapai 100%, dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 105% (terlampaui).
b. Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 116,67%, terdapat penurunan sebesar 11,67%.
c. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD, diproyeksikan sasaran akan berhasil tercapai.

Keberhasilan capaian Indikator Prosentase peningkatan capaian tersebut didukung dari :

a. Capaian Rumusan kebijakan stabilitas perekonomian daerah yang menjadi dasar kebijakan teknokratis dalam dokumen perencanaan (%)

Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui inisiasi dari Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Inflasi DIY pada 2021 mencapai 2,29% baik secara (yoy) dan (ytd), sejalan dengan sasaran yang ditetapkan pada 3 +/- 1% (yoy). Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY selaku sekretariat TPID selalu berupaya berinovasi dalam kegiatan pengendalian inflasi daerah. Hal ini terbukti dengan dicapainya penghargaan berupa TPID Provinsi Berkinerja Terbaik Wilayah Jawa-Bali yang diadakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia tahun 2021.

Gambar 3.1 Penghargaan TPID Provinsi Berkinerja Terbaik Wilayah Jawa-Bali

Sumber: Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY

Selain menjaga stabilisasi harga, TPID DIY saat ini juga menitikberatkan pada menjaga kestabilan produksi dan pasokan komoditi pangan sehingga menginisiasi tersusunnya Peraturan Gubernur DIY nomor 71 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Tata Niaga Pangan Lokal. Dengan adanya Peraturan Gubernur ini, diharapkan antara lain:

a. Menjaga kestabilan produksi dan pasokan komoditi pangan
b. Meningkatkan produktifitas dan kestabilan harga komoditi pangan
c. Memudahkan pengawasan distribusi pangan dari produsen sampai ke konsumen
d. Adanya ketersediaan Sistem Informasi Tata Niaga Pangan yang akurat berkaitan dengan produktifitas, pola distribusi, jumlah pasokan dan harga di DIY sebagai instrumen system peringatan dini dalam pengendalian inflasi.

Dalam menjaga ketahanan ekonomi lokal sebagai upaya pengendalian inflasi di DIY diperlukan adanya pengawasan iklim persaingan usaha yang sehat secara lebih intensif sebagai langkah optimalisasi pengelolaan potensi dan sumber daya daerah secara efektif dan efisien guna meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemda DIY menginisiasi adanya kerja sama dengan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) untuk bersama-sama menciptakan iklim persaingan usaha melalui pengawasan secara terintegrasi.

Optimalisasi peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) DIY dalam upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan di daerah melalui sinergi program kerja yang lebih luas melibatkan lintas Perangkat Daerah dan lintas sektor di luar dan dalam lingkup Pemerintah Daerah DIY. Beberapa program kerja TPAKD Tahun 2021 antara lain 1) Program Unggulan *Business Matching* melalui Optimalisasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Destinasi Prioritas Pariwisata DIY, 2) Program Tematik “Optimalisasi Produk dan Layanan Keuangan” dengan Program Kredit Pembiayaan Melawan Rentenir melalui Penyaluran Kredit Pembangunan Ekonomi Daerah “PEDE” PT Bank BPD DIY, 3) Program Tematik “Penguatan Infrastruktur dan Akses Keuangan” dengan Program Digitalisasi KUR, dan 4) Program Tematik “Peningkatan Literasi Keuangan” dengan Program Lingkup Sekolah Berbudaya Menabung dan Wirausaha (Lilah Dana & Usaha).

Gambar 3.2 Penghargaan Wilayah Terbaik dalam Implementasi SimPel/SimPel iB Tingkat Provinsi

Peningkatan ekonomi melalui pemberdayaan UMKM juga dioptimalkan melalui pelaksanaan program KUR yang ditindaklanjuti dengan penyusunan website KUR Jogja (kurjogja.id) untuk mempercepat proses pengajuan KUR dan meminimalisir interaksi sosial dalam masa pandemi COVID-19 oleh TPAKD DIY yang akan dihibahkan kepada Pemerintah Daerah DIY pada Tahun 2022.

Dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan daya saing daerah, Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY menginisiasi kesepakatan bersama dengan PT Ekonomi Sirkular Indonesia terkait pengembangan kewirausahaan manajemen (pemasaran) produk berlebih bagi pelaku usaha di DIY (khususnya) dan untuk meningkatkan perekonomian daerah DIY.

Rumusan kebijakan stabilitas perekonomian daerah yang dihasilkan antara lain:

1. Surat Edaran tentang Penyerapan Dan Pemanfaatan Komoditas Pangan Lokal Nomor: 510/3074 Tanggal: 17 Februari 2021
2. Laporan Implementasi Penyerapan dan Pemanfaatan Komoditas Pangan Lokal di lingkup Pemerintah Daerah DIY Nomor: 510/00458 Tanggal 3 Maret 2021Instruksi Gubernur DIY tentang Penyerapan dan Pemanfaatan Komoditas Pangan Lokal Nomor: 5/INSTR/2020 tanggal 4 Desember 2020
3. Surat Edaran tentang Implementasi Program Beras ASN Nomor: 529/19449 Tanggal: 22 September 2021

4. Rencana Kerja antara Pemerintah Daerah DIY dan Bank Indonesia tentang Pendataan, Pengembangan Sistem Ekonomi Hub (Pusat) dan Pengembangan Sektor Riil Perekonomian DIY Nomor: 119/19386 - 23/54/Yk/Srt.P/B, Tanggal 22 September 2021
5. Keputusan Gubernur DIY Nomor 134/Tim/2021 tanggal 27 Januari 2021 tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program KUR
6. Keputusan Gubernur DIY Nomor 136/TIM/2021 tanggal 27 Januari 2021 tentang Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah
7. Kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah DIY dan PT Ekonomi Sirkular Indonesia Nomor 119/22583/2021 --- 001/MOU/DIY/1/2021 tanggal 16 November 2021 tentang Kerjasama Pengembangan Kewirausahaan Manajemen Produk Berlebih untuk Meningkatkan Perekonomian Daerah di DIY

b. Capaian Rumusan kebijakan rekayasa pertumbuhan perekonomian berkeadilan yang menjadi dasar kebijakan teknokratis dalam dokumen perencanaan (%)

Sebagai tindak lanjut dukungan terhadap program Pemda, Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY menginisiasi terbitnya Peraturan Gubernur DIY Nomor 93 tahun 2020 tentang Desa/Kalurahan Mandiri Budaya. Desa/Kalurahan Mandiri Budaya merupakan sinergi dan harmonisasi dari program/kegiatan Desa/Kalurahan Budaya, Desa Wisata, Desa Prima dan Desa Preneur. Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

a. pembentukan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya
b. pengelolaan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya
c. monitoring dan evaluasi Desa/ Kalurahan Mandiri Budaya

Program Desa/Kalurahan Mandiri Budaya merupakan program yang telah dicanangkan dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY. Hal tersebut tertuang pada Program Pembangunan Daerah dengan berdasar pada arah kebijakan dan program strategis, dimana Desa/Kalurahan Mandiri Budaya merupakan prioritas pembangunan DIY dengan target pada capaian kinerja program terdapat 5 Desa/Kalurahan Mandiri Budaya pada tahun 2019 dan sampai tahun 2022 ditargetkan tercapai sebanyak 20 Desa/Kalurahan Mandiri Budaya.

Pada tahun 2020, Pemerintah Daerah DIY melalui Keputusan Gubernur DIY Nomor 364/KEP/2020 tentang Penetapan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya Tahun 2020 telah menetapkan 10 Desa/kalurahan sebagai Desa/kalurahan Mandiri Budaya dan pada tahun 2021 telah ditetapkan Keputusan Gubernur DIY Nomor 383/KEP/2021 tentang Penetapan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya 2021. Selain itu di tahun 2021 juga dilakukan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Penyelenggaraan Desa Mandiri Budaya.

Gambar 3.3 Evaluasi Evaluasi Penyelenggaraan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya Tahun 2021

Adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan pembatasan aktivitas, berkaitan dengan hal ini maka diperlukan penyesuaian pada arah pembangunan dan pengembangan kepariwisataan DIY. Dalam mewujudkan misi kepariwisataan yang kreatif dan inovatif, maka arah pembangunan yang ditempuh sebagai berikut:

a. Pengembangan kepariwisataan yang berkelanjutan (*sustainable tourism*) yang berorientasi pada pariwisata yang berkualitas (*quality tourism*), inklusif, dan berbasis nilai tambah (value *added principles*)

b. Peningkatan daya saing destinasi dengan meningkatkan standar kualitas daya tarik wisata, aksesibilitas dan amenitas yang berfokus pada kawasan pariwisata prioritas dan wilayah bagian selatan DIY

c. Pengembangan kepariwisataan berbasis masyarakat yang kreatif, inovatif dan resiliens dengan mendoorng pengembangan desa/ kampung wisata kreatif dan desa wisata agro

d. Pengembanagn sinergi pariwisata dan ekonomi kreatif dalam bentuk pemaketan wisata yang kreatif, penyelenggaraan event dan festival berkelas dunia serta produk ikutan wisata (souvenir, oleh-oleh, dll) yang berkualitas

e. Pengembangan ekosistem digital pariwisata dengan mendorong transformasi digital usaha dan jasa pariwisata

f. Pengembanagn SDM kepariwisataan DIY yang berwawasan sustainability, kreatif dan berdaya saing

g. Pengembangan pemasaran pariwisata yang tepat sasaran, kreatif, mengoptimalkan teknologi digital dan sinergis dengan pemangku kepentingan pariwisata

h. Peningkatan daya saing industri pariwisata dengan mendorong kredibilitas bisnis, kemitraan dan tanggung jawab lingkungan

i. Peningkatan peran swasta dan kemitraan Pentahelix dalam rangka pengembangan kepariwisataan DIY yang kreatif, inovatif dan berdaya saing termasuk di dalamnya pengembangan yang terpadu dalam bidang *trade, Tourism and Invesment* (TTI)

Dalam perwujudan percepatan pembangunan, DIY memiliki peran penting dan strategis dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga diperlukan adanya koordinasi yang efektif antara pemangku kepentingan untuk menjamin akurasi penyelenggaeaan percepatan pembangunan program yang diprioritaskan, Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY menginisiasi terbitnya Keputusan Gubernur DIY Nomor 16 TIM/2021 tentang Tim Percepatan Pelaksanaan Program Prioritas Pembangunan dan Keputusan Gubernur DIY Nomor 130/TIM/2021 tentang Project Management Unit Percepatan Pelaksanaan Program Prioritas Pembangunan.

Program Prioritas telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur DIY No 163/KEP/2017 tentang Program Prioritas Pembangunan, di mana saat ini sebagian telah selesai pembangunannya sehingga ditetapkan Keputusan Gubernur DIY No 353/KEP/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 163/KEP/2017 tentang Program Prioritas Pembangunan yang terdiri dari Program Pembangunan Infrastruktur Prioritas, Program Penataan/ Pengembangan Kawasan Prioritas, dan Program Strategis Lainnya yang Diprioritaskan.

Rumusan kebijakan rekayasa pertumbuhan perekonomian berkeadilan yang dihasilkan antara lain:

1. Keputusan Gubernur DIY Nomor 16/TIM/2021 tentang Tim Percepatan Pelaksanaan Program Prioritas Pembangunan
2. Keputusan Gubernur DIY Nomor 130/TIM/2021 tentang *Project Management Unit* Percepatan Pelaksanaan Program Prioritas Pembangunan
3. Keputusan Gubernur DIY Nomor 237/TIM/2021 tentang Pembentukan Tim Percepatan Pelaksanaan Program Prioritas Pembangunan Tahun 2022
4. Keputusan Gubernur DIY Nomor 330/KEP/2021 tentang Pembentukan *Project Management Unit* Percepatan Pelaksanaan Program Prioritas Pembangunan Tahun 2022
5. Keputusan Gubernur DIY Nomor 353/KEP/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 163/KEP/2017 tentang Program Prioritas Pembangunan
6. Keputusan Gubernur DIY Nomor 383/KEP/2021 tentang Penetapan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya 2021
7. Surat Edaran Gubernur DIY Nomor 23/SE/IV/2021 Tanggal 30 April 2021 kepada Bupati/Walikota se DIY, Kepala Instansi Vertikal, Kepala OPD Pemda DIY tentang Gerakan Berwisata Aman dan Sehat dalam Upaya Mendorong Percepatan Pemulihan Industri Pariwisata DIY
8. Keputusan Sekretaris Daerah DIY Nomor 14/SEKDA/II/2021 tentang Penunjukan Personil Project Management Unit dan Sekretariat Project Management Unit Percepatan Pelaksanaan Program Prioritas Pembangunan
9. Keputusan Sekretaris Daerah DIY Nomor 15/SEKDA/II/2021 tentang Tim Koordinasi Program Pembangunan Pariwisata Terintegrasi dan Berkelanjutan Borobudur-Yogyakarta-Prambanan
10. Nota Dinas Nomor 556/00019 tanggal 6 Januari 2021 tentang Pembaharuan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Kawasan Hutan Lindung Mangunan
11. Nota Dinas Nomor 193/00026 tanggal 7 Januari 2021 tentang Dukungan Pemda DIY untuk Materi Promosi Ekonomi dan Kebudayaan Indonesia di KBRI Vientiane, Laos

12. Nota Dinas Nomor 430/00088 tanggal 18 Januari 2021 tentang Tidak Lanjut Arahan Gubernur DIY tentang Pelaksanaan Desa Mandiri Budaya
13. Nota Dinas Nomor 556/00259 tanggal 9 Februari 2021 tentang Hasil Koordinasi Pembahasan Perpanjangan Relaksasi dari Lembaga Keuangan yang Diterima oleh Para Pelaku Industri
14. Nota Dinas Nomor 556/000257 tanggal 9 Februari 2021 tenang Hasil Rapat Koordinasi Pembahasan Perpanjangan Relaksasi dari Lembaga Keuangan yang Diterima oleh Para Pelaku Industri dan Pointer Bahan Audiensi Antara GIPI dengan Gubernur DIY
15. Nota Dinas Nomor 556/00369 tanggal 23 Febaruari 2021 tentang Tindak Lanjut Audiensi DPD Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) DIY dengan Bapak Gubernur DIY
16. Nota Dinas Nomor 556/00507 tanggal 9 Maret 2021 tentang Hasil Koordinasi dengan DPD Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) DIY
17. Nota Dinas Nomor 556/00604 tanggal 18 Maret 2021 tentang Hasil Audiensi dengan Gabungan Penyelenggara Pernikahan Yogyakarta (GAPPY)
18. Nota Dinas Nomor 556/00714 tanggal 26 Maret 2021 tentang Hasil Pembahasan Terkait Opsi Stimulus Berupa Pengurangan Beban dan Pemberdayaan Yang Dapat Diberikan Pemda DIY Kepada Pelaku Industri Pariwisata Serta Kemudahan Pinjaman Lunak Untuk Modal Kerja Bagi Pelaku Industri Pariwisata
19. Nota Dinas Nomor 500/00774 tanggal 6 April 2021 tentang Hasil Pembahasan Draft Kesepakatan Bersama MPU tentang Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
20. Nota Dinas Nomor 503/01008 tanggal 29 April 2021 tentang Hasil Sosialisasi Kegiatan Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) Pemerintah Daerah serta Kinerja PBB Kementerian Negara / Lembaga
21. Nota Dinas Nomor 560/01149 tanggal 11 Mei 2021 tentang Hasil Penerimaan Kunjungan Tim Percepatan Penyelenggaraan ULD Bidang Ketenagakerjaan
22. Nota Dinas Nomor 050/01250 tanggal 24 Mei 2021 tentang Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Percepatan Pelaksanaan Berusaha di Daerah Istimewa Yogyakarta

23. Nota Dinas Nomor 556/02329 tanggal 20 Agustus 2021 tentang Hasil Pembahasan Terkait Tindak Lanjut Surat GIPI DIY Terkait Penyampaian Sikap dan Rekomendasi Industri dan Profesi Anggota DPD GIPI DIY terhadap Perpanjangan PPKM Darurat
24. Nota Dinas Nomor 528/02365 tanggal 25 Agustus 2021 tentang Hasil Koordinasi Pembahasan Usulan Program Prioritas Pembangunan Kawasan Pantai Selatan Gunungkidul
25. Nota Dinas Nomor 556/02440 tanggal 1 September 2021 tentang Hasil Koordinasi Penyusunan SOP dengan Pelaku/ Asosiasi Usaha Jasa Pariwisata
26. Nota Dinas Nomor 119/02648 tanggal 15 September 2021 tentang Hasil Audiensi Terkait Potensi Kerjasama Antara PT Ayopop Teknologi Indonesia dengan Pemda DIY
27. Nota Dinas Nomor 050/02715 tanggal 20 September 2021 Hasil Monitoring dan Evaluasi Terhadap Progress Pelaksanaan Program Prioritas Pembangunan DIY pada Kawasan Sumbu Filosofi dan Kawasan Pantai Selatan DIY
28. Nota Dinas Nomor 556/02716 tanggal 20 September 2021 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Surat Edaran Gubernur DIY Nomor 443/7130 tentang Pemberian Insentif/ Stimulus Berupa Pengurangan atau Pengahapusan Pajak dan Retribusi Daerah bagi Pelaku Usaha, Surat Gubernur DIY Nomor 556/6650 tentang Pemberian Stimulus/Insentif berupa Penghapusan/ Keringanan atas Pajak dan Retribusi Daerah bagi Pelaku Usaha Industri Pariwisata serta Surat Walikota Yogyakarta Nomor 900/4490 perihal Permohonan Keringanan/ Stimulus Bagi Pelaku Sektor Ekonomi
29. Nota Dinas Nomor 500/03156 tanggal 18 Oktober 2021 tentang Hasil Rapat Kerja Penyusunan Kebijakan Pengembangan Ekonomi Daerah, tema “Upaya Mendorong Perekonomian DIY melalui Percepatan Pemulihan Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
30. Nota Dinas Nomor 430/03521 tanggal 02 November 2021 tentang Laporan Hasil Rapat Koordinasi Pembahasan Perubahan Pergub DIY Nomor 93 Tahun 2020 tentang Desa/ Kalurahan Mandiri Budaya dan Perubahan Keputusan Gubernur DIY Nomor 129/TIM/2020 tentang

Pembentukan Tim Penilaian dan Monitoring Evaluasi Desa/ Kalurahan Mandiri Budaya

31. Nota Dinas nomor 579/ 03681 tanggal 08 November 2021 tentang Ekspose Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Daerah, tema "Membangun Iklim Penanaman Modal Yang Berdaya Saing Dalam Rangka Mendorong Pertumbuhan Ekonomi di DIY"
32. Nota Dinas nomor 500/04257 tanggal 25 November 2021 tentang Arah Kebijakan Perekonomian Tahun 2023

c. Capaian Rumusan kebijakan perlindungan sumber daya perekonomian yang menjadi dasar kebijakan teknokratis dalam dokumen perencanaan (%)

Pendekatan ekonomi yang berkelanjutan dapat mendorong laju perekonomian Indonesia sekaligus menjadi salah satu solusi untuk mengatasi berbagai dampak ekonomi yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Ekonomi yang berkelanjutan sendiri merupakan suatu gagasan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan sekaligus berkeinginan untuk melestarikan lingkungan dan sumber daya yang terbatas.

Sejalan dengan visi DIY yang ingin menjadikan pesisir selatan sebagai halaman depan, maka pengembangan wilayah tersebut menjadi suatu program prioritas sehingga terjadi keseimbangan tingkat perekonomian yang selama ini cenderung berkiblat pada sisi utara (wilayah non-pesisir). Meskipun demikian, prinsip pembangunan dan ekonomi yang berkelanjutan tetap menjadi pokok pemikiran utama.

Beberapa kegiatan yang diharapkan daapt mendukung tujuan besar diatas antara lain adalah :

a. Kajian Pemetaan Sektor Produksi dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi
b. Kajian Pengelolaan Pertanian Tanaman Pangan Berbasis Pada Sosial Budaya dan Kearifan Lokal Pada Masyarakat Kawasan Pesisir Pantai Bantul, Kulon Progo, Gunungkidul
c. Kajian Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di DIY
d. Valuasi Jasa Lingkungan Sektor Utama Pendukung Percepatan Pemulihan Ekonomi

Disamping ketugasan sesuai tugas dan fungsi yang melekat, terdapat pula ketugasan sebagai berikut :

a) sesuai dengan pemetaan yang disusun oleh Kementerian Dalam Negeri dimana Bagian Pengelolaan Sumber Daya Perekonoian mengampu koordinasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang terdiri atas ketugasan dan anggaran di bidang Penegakan Hukum dan bidang Kesejahteraan Masyarakat. Kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau merupakan ketugasan koordinasi lintas sektor yang bermitra terutama dengan Bea Cukai DIY dan Satuan Polisi Pamong Praja DIY serta juga berkoordinasi lintas pemerintahan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
b) Sebagai koordinator penetapan usulan kuota Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan se Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta
c) Sebagai koordinator penetapan usulan kuota LPG 3 Kg se Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta

Untuk mencapai target kinerja sesuai ketugasan serta mewujudkan perlindungan terhadap sumber daya perekonomian di DIY, disusun beberapa rumusan kebijakan perlindungan sumber daya perekonomian yaitu :

1. Materi teknis Perda/Pergub Ekonomi Hijau yang menjadi suplemen dalam kaitannya dengan pembahasan regulasi tersebut di DPRD Tingkat II DIY

2. Nota Dinas Kajian Penyusunan Valuasi Jasa Lingkungan Sektor Utama Pendukung Percepatan Pemulihan Ekonomi (Kabiro ke Sekda DIY) Disposisi Sekda DIY No. 500/10487, tgl 4 Nopember 2021

3. Nota Dinas Kajian Pengelolaan Pertanian Tanaman Pangan Berbasis Pada Sosial Budaya Dan Kearifan Lokal Pada Masyarakat Kawasan Pesisir Pantai Bantul, Kulonprogo, Gunungkidul (Kabiro ke Sekda DIY) Disposisi Sekda DIY No. 500/10483, tgl 4 Nopember 2021

4. Nota Dinas Hasil Koordinasi Dengan Opd Terkait Potensi Ekspor Pertanian DIY (Kabiro ke Sekda DIY) Surat Kabiro APSDA Setda DIY No. 520/02499, tgl 3 September 2021

5. Nota Dinas Hasil Koordinasi Dengan Opd Terkait Percepatan Ekspor Pertanian DIY (Kabiro ke Sekda DIY) Surat Kabiro APSDA Setda DIY No. 520/02675, tgl 16 September 2021

6. SK Gubernur DIY No. 247/TIM/2021 tanggal 1 November 2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Peningkatan dan Percepatan Ekspor Komoditas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan SDA DIY

7. Sk Tim Pemantauan, Evaluasi dan Operasi DBH CHT DIY Tahun 2021 (Sekda DIY) Keputusan Sekda DIY No. 55/SEKDA/VI/2021, tanggal 22 Juni 2021

8. Nota Dinas Pengalihan Anggaran BLT DBH CHT (Kabiro ke Sekda DIY) Surat Kabiro APSDA Setda DIY No. 520/03545, tgl 2 Nopember 2021

9. Nota Dinas Permohonan Data Buruh Pabrik Rokok Dan Buruh Tani Tembakau (Sekda DIY) Surat Kabiro APSDA Setda DIY No. 520/01723, tgl 2 Juli 2021

10. Surat Nomor B-206/MG.05/DJM/2022 tentang Besaran Alokasi/Kuota LPG Tabung 3 Kg Tahun 2022 per Kabupaten/Kota sebagai jawaban atas Surat Sekretaris Daerah DIY a.n Gubernur DIY Nomor 542/21339 tentang usulan Kuota LPG Tabung 3 Kg Tahun 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta.

11. Nota Dinas Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan SDA kepada Sekretaris Daerah DIY Nomor 528/03452 tentang Laporan Kajian Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil DIY

12. Nota Dinas Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan SDA kepada Sekretaris Daerah DIY Nomor 520/03451 tentang Laporan Kajian Pemetaan Sektor Produksi dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang memiliki panjang pantai lebih dari 130,9 km, tersusun atas wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mempunyai sumber daya sangat potensial. Pemanfaatan sumberdaya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Daerah Istimewa Yogyakarta semakin beragam seiring dengan semakin meningkatnya berbagai kegiatan pembangunan, yang diikuti dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk yang bermukim di wilayah pesisir.

Dalam rangka mencapai tujuan-tujuan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau- pulau kecil secara terpadu dan berkelanjutan, perlu dirumuskan konsep pengelolaan yang mampu mengintegrasikan setiap kepentingan dalam

keseimbangan (proporsionality) antara dimensi ekologis, sosial, dan ekonomi, antar-sektor, antar-disiplin ilmu, dan segenap pelaku pembangunan (pemangku kepentingan).

Dengan adanya Kajian Rencana Pengelolaan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil di DIY diharapkan akan tersusun bahan rumusan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil berkelanjutan yang dapat menjadi suatu rekomendasi terhadap penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah DIY sesuai amanat Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Desain yang menyeluruh perlu disusun, mengingat bahwa kawasan pesisir bukan hanya tanggung jawab SKPD/Dinas Kelautan dan Perikanan saja yang harus melakukan penyelesaian, akan tetapi harus melibatkan semua instansi/SKPD terkait dalam pemecahan permasalahan di kawasan tersebut sesuai dengan batasan kewenangannya.

Dukungan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan kawasan sejalan pula dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) yaitu pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Atas dasar tersebut, maka perekonomian yang disusun didasarkan atas prinsip-prinsip ekonomi hijau agar dapat berkelanjutan.

Ekonomi hijau dilihat sebagai bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan dan menekankan bahwa ekonomi hijau berhubungan dengan agenda pembangunan lainnya. Untuk melaksanakan strategi kebijakan tersebut, telah dicanangkan program pembangunan pengembangan dan peningkatan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup. Kegiatan yang sesuai dengan sasaran program pembangunan ini antara lain adalah inventarisasi dan evaluasi potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup serta pengkajian neraca sumber daya alam dan penyusunan PDB Hijau (Green GDP).

PDRB yang selama ini dihitung dan diterbitkan Kabupaten/Kota maupun Provinsi masih bersifat konvensional atau disebut PDRB Coklat atau PDRB Konvensional, karena hanya mengukur hasil dari kegiatan ekonomi

tanpa memasukkan unsur lingkungan didalamnya. PDRB Konvensional memiliki beberapa kelemahan yaitu:

a) hanya menghitung produk- produk yang dipasarkan,
b) kerusakan lingkungan dan kehilangan sumber daya dianggap sebagai biaya produksi,
c) biaya perbaikan lingkungan rusak dianggap menciptakan nilai tambah.

Oleh karena itu PDRB perlu disempurnakan dengan memperhatikan kondisi lingkungan dan sumber daya yang berkurang sehingga PDRB hijau sangat diperlukan. Melalui PDRB hijau diharapkan pembangunan sektoral maupun regional dapat direncanakan secara lebih baik dan akurat karena perencanaan didasarkan pada kinerja perekonomian yang sebenarnya (Suparmoko, 2008).

Disamping hal diatas, terdapat amanat sebagai hasil dari pemetaan tugas oleh Kementerian Dalam Negeri dalam hubungannya dengan pelaksanaan kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau secara lintas sektor dan lintas administrasi pemerintahan (lingkup provinsi dan lingkup kabuapaten/kota).

Kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau secara umum meliputi Kegiatan Kesejahteraan Masyarakat, Kegiatan di bidang Kesehatan, serta Penegakan Hukum. Alokasi anggaran yang disediakan oleh pemerintah pusat merupakan implikasi dari kontribusi cukai tembakau yang disetor oleh pemerintah daerah ke pemerintah pusat.

Gambar 3.4 Capaian Kinerja Pemerintah Daerah dalam Pemanfaatan DBH CHT

CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMANFAATAN DBH CHT DI BIDANG PENEGAKAN HUKUM TAHUN ANGGARAN 2021

NO	PEMDA	ANGGARAN	REALISASI	SERAPAN	NILAI KINERJA (skala 6)	Ket.
1	Pemda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Rp736,300,000.00	Rp534,661,000.00	72.42%	5.328	
2	Kabupaten Gunungkidul	Rp192,176,250.00	Rp186,276,250.00	96.93%	6.00	*nilai kinerja dari serapan anggaran
3	Kabupaten Bantul	Rp603,076,366.00	Rp585,429,300.00	97.07%	4.83	
4	Kabupaten Kulon Progo	Rp296,923,700.00	Rp279,540,200.00	94.15%	5.93	*nilai kinerja dari serapan anggaran
5	Kabupaten Sleman	Rp364,471,750.00	Rp356,534,973.00	97.82%	3.79	
6	Kota Yogyakarta	Rp242,970,000.00	Rp209,300,000.00	86.14%	5.43	*nilai kinerja dari serapan anggaran

Pengendalian dan penegakan hukum yang tepat dapat mencegah dan menanggulangi terjadinya peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu. Terjadinya peredaran rokok ilegal dapat mengurangi jumlah penerimaan cukai hasil tembakau oleh pemerintah. Pengendalian dan penegakan hukum yang dilakukan oleh direktorat jenderal bea dan cukai, dengan disertai kerjasama yang baik dengan dinas instansi terkait lainya dapat mencegah terjadinya peredaran rokok ilegal. Selain itu kesadaran masyarakat mengenai pengkonsumsian terhadap rokok yang legal juga dapat mencegah terhadap peredaran rokok yang ilegal dan pita cukai palsu.

Gambar 3.5 Bidang Penegakan Hukum DBH CHT

Faktor Pendukung keberhasilan

a. Kerjasama yang baik dari stakeholder yang terkait dalam pelaksanaan program kegiatan lintas sektor dalam rangka penyusunan kebijakan bidang perekonomian dan sumber daya alam
b. Komitmen dari para stakeholder terkait pembangunan dan pengembangan perekonomian di DIY

3.3. Efisiensi Anggaran

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2021 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel III.6 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya kualitas rumusan bahan kebijakan dan evaluasi kebijakan bidang perekonomian dan SDA	Persentase rumusan kebijakan menjadi kebijakan dan hasil evaluasi menjadi rekomendasi yang ditindaklanjuti dalam perencanaan tahun n+1	95	100	105,26%	3.185.135.000	2.785.431.400	87,45	Rp. 399.703.600 (12,55%)
Jumlah						**3.185.135.000**	**2.785.431.400**	**87,45**	
Program pendukung						**433.001.000**	**416.695.764**	**96,23**	
Total Belanja Langsung						**3.618.136.000**	**3.202.127.164**	**88,50**	

Berdasarkan tabel III.6 di atas dari total belanja langsung program/kegiatan yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar Rp. 3.185.135.000 terealisasi Rp. 2.785.431.400atau 87,45 %. Sisa anggaran sebesar Rp 399.703.600 atau 12,55 % antara lain bersumber dari:

- Sisa pengadaan barang dan jasa

- Belanja honor narasumber yang tidak direalisasikan karena pembatasan pertemuan tatap muka

Meskipun belanja tidak terserap 100% namun keseluruhan sasaran strategis OPD tercapai 100%, sehingga dengan demikian terdapat efisiensi belanja sebesar Rp. 399.703.600 (12,55%).

3.4. Inovasi

Tantangan global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparatur untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka inovasi yang telah dikembangkan dalam pencapaian sasaran kinerja antara lain :

a. Pemanfaatan media sosial dan google (misalnya layanan unduhan via google drive) untuk percepatan komunikasi, informasi dan edukasi.
b. Pemanfaatan zoom meeting dalam pelaksanaan rapat
c. Inisiasi Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Program Travel Corridor, Pemulihan ekonomi melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dengan mengupayakan perjalanan wisata yang aman, sehat, dan terkendali, dengan melibatkan seluruh sektor yang mendukung industri pariwisata diantara anggota MPU (Mitra Praja Utama).
d. Implementasi Program Beras ASN Mendukung Penyerapan dan Pemanfaatan Komoditas Pangan Lokal dalam mendukung pengendalian inflasi daerah
e. Percepatan pembuatan SNI Produk Garam DIY dengan Dana Keistimewaan, APBD DIY yang terserap untuk penanganan Covid-19 menjadikan pembuatan SNI atas produk garam menjadi sedikit terhambat. Untuk mengatasinya, digunakan Dana Keistimewaan untuk pembuatan sarpras pendukung dengan memberdayakan masyarakat sebagai subyek kegiatan.
f. Program Lingkup Sekolah Berbudaya Menabung dan Wirausaha (Lilah Dana & Usaha), Kegiatan pembukaan rekening simpanan pelajar (Simpel) bagi pelajar, satu rekening satu pelajar

3.4 Lintas Sektor

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan di Daerah Istimewa Yograkarta yang bersifat lintas sektoral agar berdaya dan berhasil guna untuk kesejahteraan masyarakat maka Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY sebagaimana cascading kinerja pada gambar 1.1 dan mandat kinerja sebagaimana tergambar pada gambar 1.2 melaksanakan optimalisasi lintas sektor. Silang Manajemen Kolaboratif Lintas Sektor tersebut dilaksanakan berlandaskan Instruksi Gubernur Daerah Istimea Yogyakarta No. 9/INSTR/2021 tentang Silang Manajemen Kolaboratif Lintas Sektor Pemerintah Daerah Daerah Istimwa Yogyakarta. Optimalisasi kinerja Silang Manajemen Kolaboratif Lintas Sektor merupakan salah satu faktor pendukung Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY dalam mencapai target kinerja yang telah ditentukan ditengah kondisi *Refocusing* dan realokasi anggaran untuk pemulihan ekonomi dan kesehatan dari dampak *pandemic* COVID-19. Inventarisasi Lintas Sektor Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY adalah sebagai berikut:

Tabel III.7

Inventarisasi Lintas Sektor Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY

No	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	Kelompok SASARAN	
1.	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	OPD : 1. Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY 2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY 3. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY 5. Dinas Kelautan dan Perikanan DIY	1. Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY : a. Stabilisasi Harga b. Memperkuat Kelembagaan c. Meningkatkan Infrastruktur Perdagangan d. Memperbaiki Kualitas Data 2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY : a. Stabilisasi Harga b. Memperkuat Produksi, Cadangan Pangan Pemerintah, dan Pengelolaan Ekspor-Impor pangan c. Memperkuat Kelembagaan d. Meningkatkan Infrastruktur Perdagangan e. Mendorong Kerjasama Antar Daerah	- Surat tentang Implementasi Program Beras ASN Nomor : 529/19449 Tanggal : 22 September 2021 - Rencana Kerja antara Pemerintah Daerah DIY dan Bank Indonesia tentang Pendataan, Pengembangan Sistem Ekonomi Hub (Pusat) dan Pengembangan Sektor Riil Perekonomian DIY Nomor : 119/19386 - 23/54/Yk/Srt.P/B Tanggal 22 September	Masyarakat DIY (Produsen, Distributor, Pedagang, Konsumen)	1. OPD : a. Mendukung pencapaian kinerja Sasaran RPJMD b. Meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkelanjutan c.. Mendukung pencapaian kinerja Program Perekonomian dan Pembangunan d. Mendukung pencapaian kinerja sasaran Biro Administrasi Perekonomian dan SDA e. Mendukung pencapaian kinerja sasaran f. Meningkatnya kualitas rumusan bahan kebijakan dan evaluasi kebijakan

		6. Dinas Perhubungan DIY 7. Dinas PUP-ESDM 8. Dinas Koperasi dan UKM DIY 9. Dinas Komunikasi dan Informatika DIY 10. Dinas Pariwisata DIY	f. Memperbaiki Kualitas Data g. Memperkuat Koordinasi Pusat dan Daerah 3. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY : a. Stabilisasi Harga b. Mengelola Permintaan c. Memperkuat Produksi, Cadangan Pangan Pemerintah, dan Pengelolaan Ekspor-Impor pangan d. Memperkuat Kelembagaan e. Meningkatkan Infrastruktur Perdagangan f. Mendorong Kerjasama Antar Daerah g. Memperbaiki Kualitas Data h. Memperkuat Koordinasi Pusat dan Daerah 4. Dinas Kelautan dan Perikanan DIY : a. Stabilisasi Harga b. Mengelola Permintaan c. Memperkuat Produksi, Cadangan Pangan Pemerintah, dan Pengelolaan Ekspor-Impor pangan d. Mendorong Kerjasama Antar Daerah	2021 - Laporan Kinerja Pengendalian Inflasi Daerah DIY - Kebijakan Pengendalian Inflasi Daerah DIY		bidang perekonomian dan SDA

			e. Memperbaiki Kualitas Data f. Memperkuat Koordinasi Pusat dan Daerah 5. Dinas Perhubungan DIY : a. Peningkatan Pelayanan Angkutan Barang 6. Dinas Koperasi dan UKM DIY : a. Memperkuat Kelembagaan 8. Dinas Komunikasi dan Informatika DIY : a. Memperkuat Kelembagaan			

		Instansi lain : 1. Bank Indonesia - Yogyakarta 2. Satgas Pangan Polda DIY 3. Bulog Divre DIY 4. PT. KAI Daop VI 5. PT. PLN Persero .	Instansi lain : 1. Bank Indonesia - Yogyakarta a. Stabilisasi Harga b. Memperkuat Kelembagaan c. Mendorong Kerjasama Antar Daerah d. Memperbaiki Kualitas Data e. Memperkuat Koordinasi Pusat dan Daerah 2. Satgas Pangan Polda DIY : a. Stabilisasi Harga b. Pakta Integritas Pelaku Usaha c. Memperbaiki Kualitas Data d. Memperkuat Koordinasi Pusat dan Daerah 3. Bulog Divre DIY a. Stabilisasi Harga b. Ketersediaan Stok Bahan Pangan Pokok c. Meningkatkan Infrastruktur Perdagangan 4. PT. KAI Daop VI a. Stabilisasi Harga			2. Masyarakat (Produsen, Distributor, Pedagang, Konsumen,) : a. terjaminnya harga yang terjangkau, ketersediaan stok, kelancaran distribusi bahan pokok

2	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	OPD : 1. Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY 2. Seluruh OPD DIY	Penyerapan dan Pemanfaatan Komoditas Beras Gapoktan DIY	- Surat tentang Implementasi Program Beras ASN Nomor: 529/19449 Tanggal: 22 September 2021 - Surat Edaran tentang Penyerapan Dan Pemanfaatan Komoditas Pangan Lokal Nomor: 510/3074 Tanggal: 17 Februari 2021	Gapoktan DIY	terserapnya komoditas pangan lokal (beras) produksi petani DIY

3.	Pengelolaan kebijakan dan koordinasi BUMD dan BLUD : Pelaksanaan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR)	OPD : 1. Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY 2. Dinas Koperasi dan UKM DIY 3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY 4. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY 5. Dinas Pariwisata DIY 6. Dinas Kelautan dan Perikanan DIY 7. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan	OPD : 1. Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY berkontribusi dalam a. Menyusun kebijakan KUR b. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program KUR c. Penyusunan dan penyampaian Laporan Monev KUR 2. Dinas Kopersi dan UKM DIY berkontribusi dalam a. Pendampingan KUR bagi pelaku usaha binaan b. Penyediaan data dan pemberdayaan UMKM 3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY berkontribusi dalam penyediaan data dan pemberdayaan IKM 4. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY berkontribusi dalam a. Pendampingan KUR bagi pelaku usaha binaan b. Penyediaan data dan pemberdayaan UMKM	OPD : 1. Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY : a. SK Gubernur Nomor 134/Tim/2021 tentang Pembentukan Tim Monev KUR tanggal 27 Januari 2021 b. Nota Dinas Laporan Pelaksanaan Program KUR tanggal 16 Februari 2021 c. Laporan Semester Pelaksanaan Program KUR d. Piagam Penghargaan sebagai Pemerintah Daerah Provinsi Pendukung Program KUR Terbaik II - 2021 2. Dinas Koperasi dan UKM DIY : SK Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY Nomor 353/kep/Bid.III/IX/2021 tentang Penetapan	Pelaku Usaha	1. OPD : a. Mendukung pencapaian kinerja Sasaran RPJMD b. Meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkelanjutan c.. Mendukung pencapaian kinerja Program Perekonomian dan Pembangunan d. Mendukung pencapaian kinerja sasaran Biro Administrasi Perekonomian dan SDA e. Mendukung pencapaian kinerja sasaran f. Meningkatnya kualitas rumusan bahan kebijakan dan evaluasi kebijakan bidang perekonomian dan SDA

		Anak, dan Pengendalian Penduduk DIY 8. dll	4. Dinas Pariwisata DIY berkontribusi dalam penyediaan data dan pemberdayaan UMKM 5. Dinas Kelautan dan Perikanan DIY berkontribusi dalam penyediaan data dan pemberdayaan UMKM 6. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk DIY berkontribusi dalam penyediaan data dan pemberdayaan UMKM	Tenaga Pendamping Akses Pembiayaan bagi UMKM di DIY Tahun 2021 3. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY : SK Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY Nomor 96/SK/PSP-DK/08/11/2021 tentang Fasilitasi Pelaksanaan KUR Sektor Pertanian		

		Instansi lain : 1. Dirjen Perbendaharaan DIY 2. Bank Indonesia - Yogyakarta 3. OJK DIY .	Instansi lain : 1. Dirjen Perbendaharaan DIY berkontribusi dalam penyediaan data 2. Bank Indonesia - Yogyakarta berkontribusi dalam pemberdayaan usaha 3. OJK DIY berkontribusi dalam pengawasan Lembaga Jasa Keuangan	Instansi lain : Dirjen Perbendaharaan DIY : piagam penghargaan sebagai Kanwil DJPB Katageri Kanwil Kecil Terbaik II 2021	Pelaku Usaha	2. Masyarakat (pelaku usaha) : a. Menambah modal usaha b. Meningkatkan skil pelaku usaha c. Meningkatkan kualitas produk d. Memperluas jaringan pemasaran
		Dunia usaha : Asosiasi UMKM	Dunia usaha : Asosiasi UMKM berkontribusi dalam memperluas wawasan dan informasi pasar			
		PT : 1. PT Lembaga Jasa Keuangan Penyalur KUR 2. PT Penjamin KUR	PT : 1. PT Lembaga Jasa Keuangan Penyalur KUR berkontribusi dalam pelaksana teknis dan penyedia data 2. PT Penjamin KUR berkontribusi dalam pelaksana teknis dan penyedia data			

4.	Pengelolaan kebijakan dan koordinasi BUMD dan BLUD : Pelaksanaan Program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)	OPD : 1. Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY 2. Dinas Koperasi dan UKM DIY 3. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY 4. Dinas Pariwisata DIY 5. Dinas Kelautan dan Perikanan DIY 6. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY 7. Dinas Komunikasi dan Informatika DIY	OPD : 1. Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY berkontribusi dalam a. Menyusun kebijakan TPAKD b. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program TPAKD c. Penyusunan dan penyampaian Laporan Monev TPAKD 2. Dinas Kopersi dan UKM DIY berkontribusi dalam a. Pendampingan usaha UMKM b. Penyediaan data UMKM 3. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY berkontribusi dalam a. Pendampingan pembiayaan bagi UMKM b. Penyediaan data dan pendampingan usaha UMKM 4. Dinas Pariwisata DIY berkontribusi dalam penyediaan data 5. Dinas Kelautan dan Perikanan DIY berkontribusi dalam penyediaan data dan pendampingan usaha UMKM	OPD : 1. Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY : a. SK Gubernur Nomor 136/Tim/2021 tentang Pembentukan TPAKD tanggal 27 Januari 2021 b. Nota Dinas Laporan Pelaksanaan Program TPAKD tanggal 18 Februari 2021 c. Nota Dinas Laporan Koordinasi Persiapan Sosialisasi Lilah dana dan Usaha TPAKD DIY Tahun 2021 Nomor 900/02674 tanggal 16 September 2021 d. Nota Dinas Laporan Webinar Literasi Keuangan dan Wirausaha Nomor 519/02845 tanggal 30 September 2021 e. Nota Dinas Laporan Pelaksanaan Capacity Building Penyusunan Program Kerja TPAKD	Masyarakat dan Pelajar	1. OPD : a. Mendukung pencapaian kinerja Sasaran RPJMD b. Meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkelanjutan c. Mendukung pencapaian kinerja Program Perekonomian dan Pembangunan d. Mendukung pencapaian kinerja sasaran Biro Administrasi Perekonomian dan SDA e. Mendukung pencapaian kinerja sasaran f. Meningkatnya kualitas rumusan bahan kebijakan dan evaluasi kebijakan bidang perekonomian dan SDA

		8. dll	6. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY berkontribusi dalam penyediaan data dan sosialisasi SimPel 7. Dinas Komunikasi dan Informatika DIY berkontribusi dalam penyesuaian speksifikasi website KUR Jogja	dan Pelatihan SiTPAKD Nomor 900/03006 tanggal 13 Oktober 2021 f. Nota Dinas Penyampaian Penghargaan SimPel Award Kategori Wilayah Terbaik Implementasi SimPel Nomor 580/05420 tanggal 24 Desember 2021 g. Laporan Triwulanan Pelaksanaan Program Kerja TPAKD h. Piagam Penghargaan sebagai Wilayah Terbaik Implementasi SimPel 2. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY : Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY tentang Program Satu Rekening Satu Pelajar Nomor 900/07246 tanggal 12 Agustus 2021		

		Instansi lain : 1. Dirjen Perbendaharaan DIY 2. Bank Indonesia - Yogyakarta 3. OJK DIY 4. Kantor wilayah Kementerian Agama Yogyakarta .	Instansi lain : 1. Dirjen Perbendaharaan DIY berkontribusi dalam penyediaan data 2. Bank Indonesia - Yogyakarta berkontribusi dalam pemberdayaan usaha 3. OJK DIY berkontribusi dalam pengawasan Lembaga Jasa Keuangan 4. Kantor wilayah Kementerian Agama Yogyakarta berkontribusi dalam penyediaan data dan sosialisasi SimPel	Instansi lain : Kantor wilayah Kementerian Agama Yogyakarta : Surat Edaran Kepala Kantor wilayah Kementerian Agama Yogyakarta tentang Program Satu Rekening Satu Pelajar pada Madrasah dan Pondok Pesantren di Lingkungan Kementerian Agama Tahun 2021 Nomor B-3302/Kw.12.1/4/PP.00.11/08/2021	Masyarakat dan Pelajar	2. Masyarakat (pelaku usaha dan pelajar) : a. Menambah modal usaha b. Meningkatkan skil pelaku usaha c. Meningkatkan kualitas produk d. Memperluas jaringan pemasaran e. Meningkatkan literasi dan inklusi keuangan
		Dunia usaha : Asosiasi UMKM	Dunia usaha : Asosiasi UMKM berkontribusi dalam memperluas wawasan dan informasi pasar			

		PT : PT Lembaga Jasa Keuangan Penyalur KUR, Kredit Pembangunan Ekonomi Daerah (PEDE), dan Simpanan Pelajar (SimPel)	PT : PT Lembaga Jasa Keuangan Penyalur KUR berkontribusi dalam pelaksana teknis dan penyedia data				
		Masyarakat					

5	Koordinasi dan evaluasi Penyelenggaraan Desa Mandiri Budaya	● Biro APSDA, Dinas Kebudayaan DIY, Dinas Pariwisata DIY, Dinas Koperasi & UKM, Dinas P3AP2 DIY, Biro Tata Pemerintahan, Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat, Paniradya Kaistimewaan	● Biro APSDA menyusun kebijakan berupa Pergub DIY No 93 Tahun 2020 tentang Desa/Kalurahan Mandiri Budaya, SK Gubernur DIY No 129/TIM/2020 tentang Tim Penilaian dan Monitoring Evaluasi Desa/Kalurahan Mandiri Budaya, SK Gubernur DIY No 364/KEP/2020 tentang Penetapan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya Tahun 2020, SK Gubernur DIY No 383/KEP/2021 tentang Penetapan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya Tahun 2021. Dalam penyusunan kebijakan ini dengan melibatkan beberapa OPD seperti Paniradya Kaistimewan, Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi dan UKM, DP3AP2, dll	Rekomendasi kebijakan dan evaluasi penyelenggaraan desa/kalurahan mandiri budaya	OPD dan masyarakat	Manfaat bagi OPD ● Mendukung pencapaian salah satu target kinerja Program Pembangunan Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan pada Perda nomor 3 Tahun 2018 tentang RPJMD DIY Tahun 2017-2022 yang menjadi tanggung jawab Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan yaitu indikator kinerja jumlah Desa Mandiri Budaya (Desa/Kelurahan Budaya, Desa/ Kampung Wisata, Desa Preneur dan Desa Prima) dengan target 20 Desa/Kalurahan Mandiri Budaya pada tahun 2019-2022 ● Mendukung pencapaian kinerja sasaran Biro Administrasi Perekonomian dan SDA ● Mendukung pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya kualitas rumusan bahan kebijakan

						dan evaluasi kebijakan bidang perekonomian dan SDA
			● Biro APSDA juga menyusun kajian kebijakan dan evaluasi penyelenggaraan desa/kalurahan mandiri budaya untuk menyusunan rekomendasi kebijakan penyelengaraan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya di DIY ● Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, DP3AP2 dan Dinas Koperasi dan UKM: a) Pendampingan kepada Desa Mandiri Budaya oleh OPD pengampu sesuai tugas dan fungsinya b) Pemberian pelatihan untuk peningkatan kualitas dan kemampuan SDM pengelola Desa Mandiri Budaya oleh OPD pengampu sesuai tugas dan fungsinya c) Pemberian bantuan sapras di desa mandiri budaya bail melalui Bantuan Gubernur, APBD dan APBN melalui OPD terkait			Manfaat bagi masyarakat : ● Mengurangi kemiskinan ● Mengatasi pengangguran ● Meningkatkan pemberdayaan masyarakat ● Meningkatkan investasi

6.	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan evaluasi pelaksanaan kebijakan percepatan pelaksanaan program prioritas pembangunan DIY	● Biro APSDA, Dinas PUP ESDM DIY, Dinas PTR DIY, DPPM DIY, DPKP DIY, DKP DIY, DLHK DIY, Bappeda DIY, Biro PIWP2	● Biro APSDA: koordinasi baik secara internal maupun eksternal terkait pelaksanaan Program Prioritas Pembangunan termasuk pelaksanaan Program Strategis Nasional di DIY, inventarisasi permasalahan dan hambatan serta menyampaikan rekomendasi penyelesaian permasalahan yang timbul dari pelaksanaan program prioritas, pemantauan terhadap strategi dan kebijakan percepatan pelaksanaan program prioritas pembangunan agar sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ● OPD yang terlibat: Koordinasi dan sinkronisasi OPD yang terlibat secara kontinu	Rekomendasi hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan evaluasi pelaksanaan n percepatan pelaksanaan program prioritas pembangunan DIY	OPD	Manfaat bagi OPD: ● Mendukung pencapaian kinerja Sasaran RPJMD ● Mendukung pencapaian kinerja sasaran Biro Administrasi Perekonomian dan SDA ● Mendukung pencapaian kinerja sasaran perumusan bahan kebijakan dan evaluasi kebijakan percepatan pelaksanaan program prioritas ● Mendorong percepatan pelaksanaan program-program prioritas yang telah ditetapkan Gubernur DIY ● Mendorong perkembangan pembangunan infrastruktur di DIY

7.	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam (Pemantauan dan Evaluasi Roadmap Usaha Garam DIY)	1. Bappeda DIY 2. Dinas Kelautan dan Perikanan DIY 3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY 4. Dinas Koperasi dan UKM DIY 5. Dinas Perijinan dan Penanaman Modal DIY 6. Dinas Pertanahan dan Tat Ruang 7. Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY	1. Bappeda DIY memberikan kebijakan teknokratis 2. Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai focal point dalam pengembangan usaha gram DIY 3. Dinas Perindutrian dan Perdagangan DIY melakukan persiapan dan pendampingan pelaksanaan pembuatan rumah produksi garam sebagai pendukung utama produksi garam ber-SNI 4. Dinas Koperasi dan UKM DIY melakukan pendampingan terhadap kelompok usaha garam sehingga terbentuk menjadi badan hukum 5. Dinas Perijinan dan Penanaman Modal DIY melakukan pendampingan pembuatan ijin edar, merk dagang, dan pembuatan SNI 6. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang memberikan rekomendasi lokasi yang dapat dipergunakan sebagai lokasi tunnel garam dan rumah produksi garam 7. Biro APSDA sebagai penyusun Roadmap Usaha Garam dan bertugas melakukan koordinasi serta melakukan sinkronisasi antara perangkat daerah terkait	1. Rumah produksi garam Tirta Bahari di Pantai Sepanjang, Kemadang, GK 2. Perbaikan tunnel garam di Pantai Dadapayam, Kanigoro, GK dan Pantai Sepanjang, Kemadang, GK 3. Badan hukum kelompok petani garam Tirta Bahari	1. Kelompok Usaha Garam 2. Perangkat Daerah yang tercantum di dalam Roadmap Usaha Garam	Kelompok Usaha Garam : 1. Peningkatan pendapatan anggota kelompok 2. Mata pencaharian alternatif Perangkat daerah : 1. Mendukung pencapaian kinerja Sasaran RPJMD Meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkelanjutan 2. Mendukung pencapaian kinerja Program Perekonomian dan Pembangunan 3. Mendukung pencapaian kinerja sasaran Biro Administrasi Perekonomian dan SDA 4. Mendukung pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya kualitas rumusan bahan kebijakan dan evaluasi kebijakan bidang perekonomian dan SDA

		1. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan DIY 2. Kementerian Kelautan dan Perikanan RI	1. BBPOM melakukan pendampingan dalam proses pencapaian SNI 2. BBPO bersama dengan Disperindag DIY menyusun layout rumah produksi garam 3. KKP RI memberikan support pengembangan usaha garam dengan memberikan proyek percontohan usaha garam	1. Penataan ruang rumah produksi garam 2. Eduwisata garam di Pantai Siung, GK senilai Rp 1,3 M		
		Dunia usaha	-			
		Fakultas Geografi UGM	Memberikan bantuan penelitian ilmiah mengenai kondisi fisik pesisir selatan dalam mendukung pengembangan porduksi garam DIY	Jurnal Ilmiah "Land Evaluation for Salt Ponds Development in the Coastal Area of Yogyakarta Province" (Indonesian Journal of Science & Technology)		
		Masyarakat	1. Masyarakat desa Kemadang 2. Masyarakat desa Kanigoro	Kelompok Usaha Garam Tirta Bahari Kelompok Usaha Garam Dadap Makmur		

BAB 4

Penutup

Bab 4 Berisi :

1. *Kesimpulan*
2. *Rekomendasi Peningkatan kinerja*

Hasil laporan kinerja Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah DIY tahun 2021 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pembangunan ekonomi daerah perlu memberikan solusi jangka pendek dan jangka panjang terhadap isu-isu ekonomi daerah yang dihadapi. Oleh karena itu, Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam melakukan analisis terhadap isu-isu strategis agar dapat menghasilkan bahan rumusan kebijakan strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui percepatan berusaha, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, pemerataan pembangunan wilayah menuju masyarakat mandiri, adil, maju dan sejahtera.
2. Didalam pelaksanaan analisis untuk membuat rumusan kebijakan agar dapat menghasilkan kebijakan perlu diwaspadai faktor-faktor yang dapat mengakibatkan kegagalan karena belum memadainya kemampuan dan profesionalisme SDM/aparat untuk mengatasi perubahan sosial budaya masyarakat yang tidak terkendali, pasar global/pasar bebas, perubahan iklim dan global warming. Adanya pandemi covid-19 berpengaruh pada perencanaan dan penganggaran pada tahun 2021 dengan adanya *refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan darurat serta dampak *pandemic* COVID-19. Meskipun demikian, Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam RPJMD DIY Tahun 2017-2022.
3. Penyerapan atas belanja langsung sebagai pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi OPD adalah sebesar 87,45 % dan capaian fisik sebesar 100% serta menghasilkan capaian kinerja OPD sebesar 100% yang diperoleh dari ditindaklanjutinya seluruh bahan kebijakan yang disusun oleh Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam untuk menjadi kebijakan pada tahun berikutnya.

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Memerlukan adanya masukan berupa Faktor Lingkungan Internal dan faktor Lingkungan Eksternal. Faktor-faktor ini bersifat obyektif, oleh sebab itu penentuannya harus didasarkan analisis yang tidak memihak dan atas dasar kesepakatan bersama dari anggota kelompok analisis.
2. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung peran aktif masyarakat dalam pembangunan daerah;
3. Memanfaatkan anggaran yang cukup untuk memfasilitasi peran aktif masyarakat dalam pembangunan daerah.

L A M P I R A N

Lampiran 1. Perencanaan Strategis (matriks Renstra lima tahun)

Tabel 4- 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Menghasilkan bahan rumusan kebijakan strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui percepatan berusaha, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, pemerataan pembangunan wilayah menuju masyarakat mandiri, adil, maju dan sejahtera.	Meningkatnya Kualitas Rumusan Bahan Kebijakan dan Evaluasi Kebijakan Bidang Perekonomian dan SDA	Persentase rumusan Kebijakan menjadi Kebijakan dan Hasil Evaluasi menjadi Rekomendasi yang ditindaklanjuti dalam perencanaan tahun n+1	80	85	90	95	100

Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Reviu Tahun 2021

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telepon (0274) 562811 Faksimile (0274) 555460
Website : biroperekonomian.jogjaprov.go.id Email : biro.perekonomian@jogjaprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

Dengan adanya refocusing kegiatan dan realokasi anggaran untuk penangangan pandemi COVID-19 sertatelah ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2021, dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YUNA PANCAWATI, S.E., M.Si.
Jabatan : Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : HAMENGKU BUWONO X
Jabatan : Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Yogyakarta, 12 November 2021

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
GUBERNUR	KEPALA BIRO ADMINISTRASI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	PEREKONOMIAN DAN SDA SETDA DIY
HAMENGKU BUWONO X	YUNA PANCAWATI, S.E., M.Si.
	NIP. 196606041993032007

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

Perangkat Daerah : **Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY**
Jabatan : **Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY**
Tahun Anggaran : **2021**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya Kualitas Rumusan Bahan Kebijakan dan Evaluasi Kebijakan Bidang Perekonomian dan SDA	presentase rumusan kebijakan menjadi kebijakan dan hasil evaluasi menjadi rekomendasi yang ditindaklanjuti dalam perencanaan tahun n+1	%	95	Triwulan I	12,5
					Triwulan II	37,5
					Triwulan III	85
					Triwulan IV	95

No	Program RPJMD	Penyandingan Program Permendagri 90 Tahun 2019 dan Pemutakhirannya	Anggaran
2.	Program Pengelolaan Kebijakan Perlindungan Sumberdaya Perekonomian		
3.	Program Pengelolaan Kebijakan Stabilitas Perekonomian Daerah		
4.	Program Pengelolaan Kebijakan Perlindungan Sumberdaya Perekonomian	Program Perekonomian dan Pembangunan (DBH CHT)	Rp. 85.365.000
5.	Program Administrasi Perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (APBD)	Rp. 5.138.320.388
6.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
7.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan		
	Jumlah Anggaran		Rp. 8.269.745.388

2. Mengelola Dana Keistimewaan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan, Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Subkegiatan Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya Rp. 53.710.000

Yogyakarta, 12 November 2021

PIHAK KEDUA
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

HAMENGKU BUWONO X

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
DAN SDA SETDA DIY

YUNA PANCAWATI, S.E., M.Si.
NIP. 196606041993032007

Lampiran 3. Evaluasi LKj IP Tahun Sebelumnya

R

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
INSPEKTORAT
ꦲꦤꦺꦱꦥꦺꦏꦠꦺꦴꦫꦠ꦳ꦢꦸꦤꦺꦱꦠꦺꦴꦫꦠ꦳

Kompleks Youth Centre, Jalan Kebon Agung, Tlogoadi, Mlati, Sleman
Telepon (0274) 562009 Faksimile (0274) 512567
E-mail: inspektorat@jogjaprov.go.id

Yogyakarta, 13-04-2021

Kepada
Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
di – Yogyakarta

Nomor : 700/01377
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kami telah melakukan evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja dengan tujuan:
   a. Memperoleh informasi tentang Implementasi Sistem AKIP;
   b. Menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
   c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi.
2. Dalam melakukan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Tim Evaluasi (Evaluator) Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan penilaian terhadap aspek-aspek sebagai berikut:
   a. Aspek Perencanaan Kinerja meliputi:
      1) Perencanaan Strategis, meliputi sub komponen Pemenuhan Renstra, Kualitas Renstra dan Implementasi Renstra;
      2) Perencanaan Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja, meliputi sub komponen Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja, Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja, serta Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahunan;

b. Aspek...

b. Aspek Pengukuran Kinerja meliputi:
   1) Pemenuhan Pengukuran;
   2) Kualitas Pengukuran;
   3) Implementasi Pengukuran.
c. Aspek Pelaporan Kinerja meliputi:
   1) Pemenuhan Pelaporan;
   2) Penyajian Informasi Kinerja;
   3) Pemanfaatan Informasi Kinerja.
d. Evaluasi Internal meliputi:
   1) Pemenuhan Evaluasi;
   2) Kualitas Evaluasi;
   3) Pemanfaatan Evaluasi.
e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi meliputi:
   1) Kinerja Yang di Laporkan *(Output)*;
   2) Kinerja Yang di Laporkan (*Outcome*);
   3) Kinerja Yang di Laporkan (IKU);
   4) Kinerja dari Penilaian Stakeholder.

3. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100. Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY memperoleh nilai sebesar 81,14 kategori A dengan interpretasi memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel.
4. Nilai sebagaimana tersebut di atas merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY dengan rincian sebagai berikut:
   a. Perencanaan Kinerja memperoleh nilai 27,27 atau 90,89% dari bobot sebesar 30%;
   b. Pengukuran Kinerja memperoleh nilai 22,29 atau 89,17% dari bobot sebesar 25%;
   c. Pelaporan Kinerja memperoleh nilai 11,02 atau 73,44% dari bobot sebesar 15%;
   d. Evaluasi Internal memperoleh nilai 7,33 atau 73,33% dari bobot sebesar 10%;
   e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi memperoleh nilai 13,23 atau 66,15% dari bobot sebesar 20%.
5. Terhadap rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta pada Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun 2019 yang lalu, telah dilakukan tindak lanjut berupa review terhadap dokumen rencana strategis SKPD agar selaras dengan dokumen RPJMD dan melakukan monitoring secara berkala tentang evaluasi kinerja secara menyeluruh.

6. Sehubungan...

6. Sehubungan dengan hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun 2020 seperti tersebut pada angka 4, kami merekomendasikan kepada Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY beserta seluruh jajarannya agar:
   a. Melakukan evaluasi atas program dan kegiatan OPD terkait output dan outcome yang belum sesuai dengan target yang ditetapkan;
   b. Terus melakukan upaya untuk meningkatkan kinerja organisasi sehingga seluruh target baik output maupun outcome yang ditetapkan dapat tercapai dan bisa mendapatkan penilaian yang baik atas kinerja dari stakeholder.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP pada Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY Tahun 2020, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

INSPEKTUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA INSPEKTORAT

WIYOS SANTOSO, S.E., M.Acc
NIP 19680215 199403 1 005

Tembusan :
Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY

4. Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi LKJIP Tahun Sebelumnya

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SEKRETARIAT DAERAH

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta Kode Pos 55213
Telepon (0274) 562811 Faksimile (0274) 555460
Website : biroperekonomian.jogjaprov.go.id Email : biroperekonomian@jogjaprov.go.id

TANGGAPAN/TINDAK LANJUT EVALUASI LKJ IP TAHUN SEBELUMNYA
Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah DIY

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
1.	Surat Inspektur DIY Nomor : 700/01377 tanggal 13 Maret 2021, perihal Laporan Hasil Evaluasi Implementasi Sistem AKIP Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah DIY. Rekomendasi: a. Melakukan evaluasi atas program dan kegiatan OPD terkait output dan outcome yang belum sesuai dengan target yang ditetapkan b. Terus melakukan upaya untuk meningkatkan kinerja organisasi sehingga seluruh target baik output maupun outcome yang ditetapkan dapat tercapai dan bisa mendapatkan penilaian yang baik atas kinerja dari stakeholder	Sudah dilakukan monitoring dan evaluasi setiap bulan di tingkat internal Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY atas program dan kegiatan agar kegiatan dapat berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan, termasuk dalam hal evaluasi kinerja secara menyeluruh, diharapkan ke depan hasil atas implementasi SAKIP di biro dapat lebih meningkat.

Kepala
Biro Administrasi Perekonomian dan SDA
Setda Daerah Istimewa Yogyakarta

YUNA PANCAWATI, S.E., M.Si
NIP. 19660604 199303 2 007